

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dapat menyelesaikan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 yang didalamnya berisi Program –program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sesuai dengan Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yang di tetapkan adalah " **TERWUJUDNYA SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SECARA PROFESIONAL, AKUNTABLE DAN TRANSPARAN MENUJU KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA MODEL JASA.**" Hal mengaktualisasikan VISI dan MISI Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Periode 2019 – 2023 yaitu : "**KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING**"

Disadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP 2019 ini masih terdapat banyak kekurangan , untuk itu diharapkan saran perbaikan demi penyempurnaan pada tahun – tahun yang akan datang.

Kotamobagu,

2020

**KEPALA BADAN**

PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP
PEMBINA
NIP. 19830308 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

 I.1. Gambaran Umum BPKD 1

 I.2. Tugas Pokok dan Fungsi..... 2

 I.3. Sumber Daya Manusia SKPD..... 3

BAB II PERENCANAAN KERJA

 II.1. Rencana Strategi 5

 II.1.1 Tujuan dan Sasaran 5

 II.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan..... 6

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 A. Capaian Kinerja 11

 B. Realisasi Anggaran.....13

BAB IV PENUTUP15

Lampiran-Lampiran.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Kotamobagu dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara .Hasil pemekaran Bolaang Mongondow sebagai Daerah Otonom maka diperlukan kemampuan dalam pengelolaan Keuangan Daerah terutama menggali sumber – sumber PAD dan Pengelolaan Aset Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan kepada Daerah. Dengan semakin meningkatnya kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah maka peran keuangan daerah akan semakin penting, karena Daerah dituntut untuk dapat lebih aktif dalam memobilasi dana yang diterima dari Pemerintah Pusat secara efisien.

Dengan demikian peran Pemerintah Daerah semakin besar, bukan saja karena harus meningkatnya kemandirian dalam pembiayaan pembangunan di Daerah,tetapi juga karena perlu melayani sector dunia usaha yang semakin meningkat aktivitasnya di Daerah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan dan menggali sumber daya yang ada yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia, selaku pengelolaan Keuangan Daerah yang semakin meningkat merupakan tuntutan perwujudan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Struktur BPKD Kota Kotamobagu

Kepala Dinas membawakan Sekretariat dan 6 (enam) bidang, yaitu :

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Perbendaharaan
3. Kepala Bidang Anggaran
4. Kepala Bidang Aset Daerah
5. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
6. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran
7. Kepala Bidang Penagihan Pajak

1. **Sekretaris** membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Bidang **Perbendaharaan** membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan
 2. Sub Bidang Belanja Non Kegiatan
 3. Sub Bidang Pembinaan Keuangan Daerah dan Desa
3. Kepala Bidang **Anggaran** membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :
 1. Sub Bidang Penyusunan APBD
 2. Sub Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian APBD
 3. Sub Bidang Dana Transfer
4. Kepala Bidang **Aset Daerah**, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengelolaan
 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Dokumen
 3. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan
5. Kepala Bidang **Akuntansi dan Pelaporan** membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Verifikasi Pencatatan Akuntansi
 2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan
 3. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Sistem Akuntansi
6. Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Pendataan, Perhitungan dan Penetapan
 2. Sub Bidang Penilaian dan Pengaduan
 3. Sub Bidang Pelayanan dan Pengolahan Data
7. Kepala Bidang Penagihan Pajak membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
 1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut
 3. Sub Bidang Pengawasan, Penyelesaian Keberatan dan Penertiban

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan kebijakan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang Keuangan dan Aset Daerah
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi

1.2.1. Dasar Hukum Pembentukan SKPD

1. Dasar Pembentukan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yang telah di atur dalam Peraturan Walikota No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A

2. Gambaran Umum BPKD

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yang melaksanakan urusan penunjang di bidang Keuangan dan Aset Daerah

1.3. Sumber Daya Manusia SKPD

Kondisi Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Jumlah dan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai :

56 orang

- Laki – laki : 35 orang
- Perempuan : 21 orang

b) Pendidikan Formal

Strata 2 (S2) : 6 orang

Strata 1 (S1) : 32 orang

Sarjana Muda	: -
Diploma III (D3)	: 1 Orang
<u>SLTA</u>	<u>: 17 orang</u>
Jumlah	: 56 Orang

c) Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan

- Diklat PIM II	: -
- Diklat PIM III	: 1 Orang
- Diklat PIM IV	: 2 Orang
- Diklat Teknis	:

d) Pegawai Menurut Golongan

- Golongan IV / c	: -
- Golongan IV / b	: 1 orang
- Golongan IV / a	: -
- Golongan III / d	: 2 orang
- Golongan III / c	: 8 Orang
- Golongan III / b	: 21 Orang
- Golongan III / a	: 5 orang
- Golongan II / d	: 3 orang
- Golongan II / c	: 2 orang
- Golongan II / b	: 9 orang
- Golongan II / a	: 5 orang

e) Jumlah Jabatan / Eselon

- Eselon II	: 1 orang
- Eselon III	: 6 Orang
- Eselon IV	: 21 Orang

BAB II

PERENCANAAN KERJA

2.1. Rencana Strategi

2.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan atau cara pandang ke depan kemana arah organisasi harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi juga merupakan imajinasi atau proyeksi tentang gambaran masa depan yang lebih baik yang dapat dicapai.

Mengacu pada konsep tersebut maka dirumuskan Visi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu yaitu ***"Terwujudnya Sistem Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Secara Profesional, Akuntabel Dan Transparan Menuju Kotamobagu Sebagai Kota Model Jasa"***.

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan Transparan;

2.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada VISI dan MISI serta didasarkan pada isu-isu dan Analisa strategis.

Tujuan yang diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi :

- 1) Meningkatnya kapasitas aparatur
- 2) Meningkatkan kualitas disiplin aparatur
- 3) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
- 4) Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

- 5) Mewujudkan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan, peningkatan pendapatan dan penatausahaan asset daerah secara tertib, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi

Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Sasaran yang hendak dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu antara lain :

- 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang handal
- 2) Meningkatnya disiplin aparatur
- 3) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
- 4) Meningkatnya pelaksanaan administrasi perkantoran
- 5) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan manajemen barang milik daerah

Strategi dan Arah Kebijakan BPKD

Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandangan dalam melaksanakan tujuan organisasi.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu dalam mewujudkan VISI nya menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Menggunakan system informasi pengelolaan Keuangan yang terintegritas,
2. Membuat dan menerapkan system dan prosedur penatausahaan yang terintegrasi,
3. Membuat dan menetapkan Analisa standar belanja,
4. Membuat dan menerapkan system dan prosedur Pengelolaan barang daerah,
5. Menyusun dan menerapkan system prosedur Akuntansi keuangan Daerah,
6. Menyusun dan menerapkan Kebijakan Akuntansi keuangan daerah,
7. Melaksanakan pengendalian keuangan daerah,

8. Melaksanakan Inventarisasi Aset Daerah
9. Peningkatan kualitas Sumber Dayan Manusia (SDM) yang diarahkan untuk memenuhi sumber daya aparatur yang professional dalam pengelolaan keuangan daerah
10. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana kerja sesuai kebutuhan dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI),
11. Melaksanakan Pelatihan/ BIMTEK / Sosialisasi aparat pengelola keuangan daerah di lingkungan SKPD,
12. Mengikut sertakan Aparat pengelola keuangan daerah dalam kegiatan Diklat yang diadakan oleh pemerintah pusat, Provinsi, kabupaten maupun Lembaga lainnya,
13. Pemenuhan Pegawai sesuai kebutuhan.

Kebijakan

Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu adalah ;

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia (SDM) pengelolaan Keuangan dan Aset daerah pada tingkat SKPD dan PPKD,
2. Peningkatan kemampuan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan keuangan dan Aset daerah
3. Pengembangan dan Penyusunan kebijakan, Standar, system dan prosedur pengelolaan keuangan dan Aset daerah,
4. Mendorong efektivitas dan efisiensi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan APBD dan Aset daerah,
5. Pengembangan dan peningkatan sarana dan kegiatan pengendalian dan supervise pengelolaan keuangan dan Aset daerah,
6. Penataan Struktur organisasi Pengelolaan keuangan dan Aset daerah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Tabel 2.2
Rencana Strategi 5 (lima) tahun

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)				
					2019	2020	2021	2022	2023
					4	5	6	7	8
Mewujudkan Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan, Peningkatan Pendapatan dan Penatausahaan Aset Daerah Secara Tertib, Transparan dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan akhir tahun	1 doc	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Barang Milik Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah PAD (Rp)		Peningkatan PAD	20.342.069.526	21.359.173.002	22.427.131.652	23.548.488.235	24.725.912.647
	Presentase SILPA terhadap APBD	2,81 %		Presentasi Silpa terhadap APBD	2%	2%	2%	2%	2%
Meningkatkan kualitas disiplin aparatur	Presentase kepatuhan/disiplin aparatur	100 %	Meningkatnya disiplin aparatur	Tingkat Kepatuhan Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur	Presentase kualitas sarana dan prasarana aparatur	100 %	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur	Presentase kualitas sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kapasitas Aparatur	Presentase kapasitas aparatur	100 %	Mewujudkan Kualitas SDM aparatur yang handal	Persentase SDM aparatur yang handal	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 %	Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

INDIKATOR KINERJA	FORMULA
(2)	
1. Predikat Pengelolaan Keuangan	Opini
2. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\text{Jumlah PAD (n)} - \text{Jumlah PAD (n-1)}}{\text{Target PAD (n)}} \times 100\%$
3. Persentase Silpa terhadap APBD	$\frac{\text{Jumlah Silpa}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Barang Milik Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Persentase Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 3. Presentase Silpa terhadap APBD	WTP Rp. 20.342.069.526 2%

Berdasarkan perencanaan kinerja diatas, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan Perjanjian Kinerja berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Barang Milik Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 3. Presentase Silpa terhadap APBD	WTP Rp. 20.342.069.526 2%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 777.473.975,-	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 4.598.739.196,-	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, berikut perbandingan target dan realisasi pencapaian sasaran strategis berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2019.

Sasaran : “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Barang Milik Daerah”

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		Capaian kinerja
			2018	2019	2018	2019	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Barang Milik Daerah	1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
		2. Peningkatan PAD	25%	10%	9,08%	10%	10%
		3. Presentase Silpa terhadap APBD	2,81%	2%	2%	2%	2%

Pencapaian Sasaran, Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan manajemen barang milik daerah melalui dicapai melalui 3 (tiga) indikator sasaran :

1. Indikator meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
- Pada tahun 2019 direncanakan penyusunan 1 dokumen Laporan Keuangan di akhir tahun anggaran dan dapat direalisasikan 100% sebagai akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan baik SKPD maupun SKPKD dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian
2. Indikator Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
- Pencapaian indikator sasaran meningkatnya pendapatan asli daerah di lakukan dengan indikator presentase peningkatan pendapatan asli daerah, pada tahun 2018 pencapaian pendapatan asli daerah sebesar Rp. 64.164.285.188,- dan pada tahun 2019 mencapai Rp. 64.309.705.604,08, dengan kata lain meningkat Rp. 145.420.416,08.

Formula yang digunakan adalah ***Jumlah PAD (n) / Jumlah PAD (n-1) + Target (n) x 100%*** yaitu Rp. 64.309.705.604,08 / 64.164.285.188 + 20.342.069.526 = 76,10%

Pendapatan Asli daerah Kota Kotamobagu pada tahun 2019 terdiri dari jumlah pajak sebesar Rp. 20.443.606.079,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 1.620.502.125,- Jumlah lain-lain PAD yang sah terdiri jasa giro kas daerah, jasa giro SKPD, bunga deposito dan penerimaan lain-lain sebesar Rp. 31.921.842.689,03 dan jumlah retribusi sebesar Rp.10.323.754.711,05,- sehingga total PAD Kota Kotamobagu sebesar Rp. **64.309.705.604,08.**

Hambatan dalam pencapaian pada pajak bumi dan bangunan dimana sejumlah objek pajak tidak berdomisili di wilayah Kota Kotamobagu sehingga sulit melakukan penarikan pajak serta kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintensifkan penarikan PBB melalui perangkat desa dan kelurahan.

3. Indikator Presentase Silpa terhadap APBD

Pada tahun 2019 direncanakan presentase silpa terhadap APBD sebesar 2% dan terealisasi 4,27% dari APBD 2019.

3.1 Realisasi Anggaran

Tabel 5. Realisasi Anggaran Tahun 2019 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Target		Realisasi Anggaran	
					Jumlah		Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan RI 2. Peningkatan PAD 3. Presentase Silpa terhadap APBD	WTP 10% 2%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 3. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 4. Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah 5. Peningkatan manajemen asset/barang daerah 6. Revaluasi/appraisal asset/barang daerah 7. Penyusunan standard satuan harga 8. Pengelolaan kas daerah online dan aplikasi informasi pencairan sp2d 9. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa 10. Pengamanan Barang Milik Daerah 11. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 12. Penyusunan dan Penertiban SPD 13. Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer 14. Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan	777.473.975 280.867.375 208.941.100 193.538.800 83.368.800 272.038.640 254.520.500 10.070.900 71.319.600 94.230.600 54.925.600 187.345.450 13.168.100 203.200.000 104.216.900	538.617.250 500.434.300 399.414.600 218.097.300 153.874.100 499.999.400 199.999.700 14.999.700 149.999.000 207.401.400 55.000.000 199.950.000 25.032.850 250.205.000 364.760.375	100 4 Lap 4 Lap 4 Lap 44 SKPD 1 Lap 1 Dok 2 Dok 25.000 Trnsksi 59 SKPD/ Desa 30 Dok 44 SKPD 10.000 Dok 100% 1 Dok	776.188.069 175.427.245 165.013.094 185.392.050 80.884.152 269.338.200 222.397.500 9.010.300 69.574.000 89.840.082 4.900.800 141.847.050 12.960.550 200.948.699 104.207.122	99,83 62,46 78,98 95,79 97,02 99,01 87,38 89,47 97,55 95,34 8,92 75,71 98,42 98,89 99,99

			Perbendaharaan Non Kegiatan					
			15. Monitoring dan Evaluasi Sumber-Sumber PAD	30.308.900	131.240.000	1 Dok	18.385.200	60,66
							19.420.350	100
			16. Pembinaan dan Pengendalian teknis Sistem Akuntansi SKPD	132.990.800	149.870.200	120 Org	128.665.750	96,75
			17. Pengawasan, Penertiban dan Penyelesaian Keberatan Sumber-Sumber PAD	53.983.650	105.199.000	90%	53.557.050	99,21
			18. Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	639.750.000	190.345.600	3 Objek	586.829.770	91,73
			19. Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	199.650.000	350.000.000	1 Jenis	198.724.350	99,54
			20. Jasa Transaksi Keuangan	105.000.000	150.000.000	42.857 Trnsksi	69.727.500	66,41
			21. Pemutakhiran Data Objek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan/Zona Nilai Tanah/Nilai Jual Objek Pajak/Peta Pajak dan Daftar Biaya Komponen Bangunan	1.039.363.200	5.400.000.000	90%	1.035.080.875	99,59
			22. Kajian Perda/Perwa/SK/SOP dan Sosialisasi Perda/Perwa/SK/SOP Pajak dan Retribusi Daerah	77.577.850	450.000.000	95%	77.441.632	99,82
			23. Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan/Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan	94.477.000	892.054.000	2000 Objek	93.527.000	98,99
			24. Penyusunan Analisis Standar Belanja	193.885.431	193.885.431	1 Dok	54.319.375	28,02

BAB IV

P E N U T U P

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A. Memiliki tugas penting yang bersifat Integral di dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yaitu menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2019.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai Misi Strategis dalam membantu Walikota untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah yang akurat, menuju pelayanan prima sehingga penyelenggaraan roda Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan terkendali.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selang Tahun 2019 dengan keterbatasan yang ada secara umum relatif baik. Namun demikian terdapat beberapa kendala seperti:

1. Terbatasnya kualitas personil baik PNS maupun Non PNS, keadaan ruang kantor yang belum memadai serta terbatasnya sarana dan prasarana
2. Penataan Tentang pengeluaran keuangan daerah sering berubah pada tatanan teknis
3. Pemahaman tentang pengelolaan keuangan untuk pejabat fungsional (pengelolaan Keuangan) di SKPD masih kurang
4. Dalam menyusun laporan keuangan, sangat diharapkan pemahaman SKPD untuk menyusun laporan keuangan setiap SKPD, solusinya adanya sosialisasi kepada pejabat pengelolaan keuangan disemua SKPD

Untuk tahun mendatang, masih banyak hal yang perlu dibenahi secara terus menerus agar pelaksanaan tugas pada akhirnya benar-benar sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah itu sendiri.

Mencermati Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu di Tahun 2019, maka untuk mendorong peningkatan kinerja tahun 2019 dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan PNS;
2. Pelaksanaan Diklat/Pembekalan bagi PNS guna meningkatkan kualitas SDM;
3. Penambahan tenaga teknis untuk pengelolaan PAD dan PBB-P2
4. Peningkatan sumber daya Aparatur pengelolaan Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset daerah.



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Ahmad Yani no. 02 no. Telp (0434) 25028 Kotamobagu kode pos 95711

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
 - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu
pada tanggal : 2019

**Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah**


HJ. INONTAT MAKALALAG, SE
PEMBINA TKT. I
NIP. 19681206 199403 2 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja Utama	Formula	Sumber Data	Penanggung Jawab
Persentase Peningkatan PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD (n)} / \text{Jumlah PAD (n-1)} + \text{Target PAD (n)}}{\text{Target PAD (n)}} \times 100\%$	- Bidang Pendataan dan Pendaftaran - Bidang Penagihan Pajak	BPKD
Predikat Pengelolaan Keuangan	Predikat WTP	- Bidang Anggaran - Bidang Akuntansi dan Pelaporan	BPKD
Presentase Silpa terhadap APBD	$\frac{\text{Jumlah Silpa}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100$	- Bidang Anggaran	BPKD

Plt. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah


Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
PEMBINA TKT. I
NIP. 19681206 199403 2 008

KESELARASAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTAMOBAGU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET	ANGGARAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Manajemen Barang Milik Daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)	WTP	6,763,796,971	Meningkatnya Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen LKPD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	1,104,003,575	Tersedianya Dokumen Ranperda/Ranperwa tentang Pertanggungjawaban APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Ranperda/Ranperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	193,538,800
		Presentase SILPA terhadap APBD	2%						Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen	777,473,975
									Terlaksananya pembinaan Sistem Akuntansi SKPD	Jumlah pengelola keuangan SKPD yang diberikan bimbingan teknis penyusunan Laporan Keuangan SKPD	180 orang	
									Tersusunnya regulasi pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah dokumen peraturan kepala daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintah daerah	3 dokumen	
									Terlaksananya rekonsiliasi antara SKPD dan PPKD	Jumlah dokumen Berita Acara Rekonsiliasi yang diterbitkan	540 BAR Kas 180 BAR Persediaan 2 BAR kolektif Dana BOS	132,990,800

					Terwujudnya waktu penetapan APBD	Penetapan APBD	Tepat Waktu	799,616,275	Tersedianya Dokumen DPA , DPPA dan SPD SKPD	Dokumen DPA dan DPPA SKPD Dokumen Permohonan Permintaan SPD SKPD	46 SKPD 4000 SPD	13,168,100
					Tersedianya Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Standarisasi	1 Dokumen		Laporan Realisasi Dana Transfer	Jumlah Laporan Sesuai Regulasi	5 Jenis	203,200,000
					Terwujudnya pelaksanaan dan Pengendalian APBD	Jumlah SPD yang diterbitkan	100%					83,368,800
					Terwujudnya Laporan Dana Transfer Tepat Waktu	Jumlah Laporan Dana Transfer	Tepat Waktu		Tersusunnya dokumen Ranperda dan Ranperkada tentang APBD	Jumlah Dokumen Ranperda dan Ranperkada APBD yang disusun	2 Dokumen	280,867,375
									Tersusunnya Dokumen Ranperda dan Ranperkada tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Ranperda dan Ranperkada Perubahan APBD yang disusun	2 Dokumen	208,941,100
									Tersusunnya Standarisasi Harga	Jumlah Dokumen Standarisasi Harga	1 Dokumen	10,070,900
					Pengelolaan BMD yang Sesuai dengan Ketentuan	Penatausahaan BMD Pemerintah yang memadai	Total BMD Pemkot	768,830,190	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran BMD	Jumlah Penelaahan RKBMD dan RKPMD	45 OPD	272,038,640
									Optimalisasi Pemanfaatan BMD	Jumlah BMD yang dimanfaatkan Pihak Lain	8 Unit	
									Rekonsiliasi BMD	Jumlah OPD yang melaksanakan Rekonsiliasi	120 UPB	
									Terlaksananya Inventarisasi BMD	Jumlah BMD yang dilaksanakan Inventarisasi	45 OPD	54,925,600
									Terlaksananya Sertifikasi Aset tetap Tanah	Jumlah Aset tetap Tanah yang di sertifikasi	15 Bidang	
									Terlaksananya Penghapusan BMD	Jumlah penghapusan BMD yang tidak digunakan	80% dari usulan SKPD	187,345,450

									Terlaksananya Pemindahtanganan BMD	Jumlah Pemindahtanganan BMD	80% dari usulan SKPD	
									Revaluasi BMD untuk kebutuhan Neraca dan Pemindahtanganan	Jumlah BMD yang dilaksanakan Penilaian	327 Unit	254,520,500
					Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	269,767,100	Terselenggaranya Pengelolaan kas daerah online dan aplikasi informasi pencairan SP2D	Terbitnya SP2D	15.500 Dokumen	71,319,600
									Terselenggaranya Pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah dan desa	Tercapainya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah dan desa	45 SKPD dan 15 Desa	94,230,600
									Terselenggaranya Pembinaan , Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan	Tercapainya pemahaman perbendaharaan oleh SKPD, sinkronisasi data perbendaharaan dengan institusi terkait,pengelolaan dan penatausahaan perbendaharaan non kegiatan yang tertib	34 SKPD	104,216,900
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	10%		Peningkatan Mutu Pengelolaan dan Pelayanan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak	Peningkatan Target Pendapatan dari objek Pajak yang ada	100%	1,956,168,050	Terlaksananya Pembayaran Jasa Bank	Terpenuhinya Permintaan Jasa Transaksi Perbankan	70%	105,000,000
						Pemutakhiran sistem/peralatan pengelolaan pajak berbasis online	50%		Meningkatkan Kerjasama Pemkot dan Perbankan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama	95%	
						Pemenuhan Database Objek Pajak yang faktual	20%		Memaksimalkan Potensi dan Target Penerimaan PAD	Tercapaiannya Target Penerimaan PAD	100%	639,750,000

								Mengoptimalkan pengelolaan data, perhitungan Nilai Jual Objek Pajak dan Penetapan Pajak Daerah	Terciptanya basis data PBB-P2, Restoran/rumah Makan, Hotel, RumahKost, Hiburan dan Pajak Reklame Papan Nama (PRPN)	100%	1,039,363,200
									Memberikan pelayanan maksimal terhadap Wajib Pajak	100%	
									Memaksimalkan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak daerah Terhutang (SPPDT) PBB-P2 dan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	100%	
								Tersedianya Ranperda dan Perda, Raperwa Dan Perwa Pemungutan Pajak Daerah	Tersedianya Ranperda Dan Perda Pemungutan Pajak Daerah	50%	77,577,850
									Tersedianya Ranperwako dan Perwako Pemungutan Pajak Daerah		
									Tersedianya Rancangan SK Kada dan SK Kada Tentang Pemungutan Pajak Daerah		
									Tersedianya SOP Pemungutan Pajak Daerah		
								Tercapainya Peningkatan Sumber - Sumber Pendapatan Pajak Daerah	Pemutakhiran Data Base Wajib Pajak Daerah	20%	94,477,000

										Penyelesaian Pengaduan Perpajakan Daerah		
					Meningkatnya Objek Pajak	Presentase Objek Pajak yang dikelola	100%	283,942,550	Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mengenai Perpajakan	Penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota yang mengatur Pajak Daerah	100%	53,983,650
									Monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Akurasi update Objek Pajak Daerah di lapangan	100%	30,308,900
									Ekstensifikasi sumber-sumber Pajak Daerah	Penagihan Objek Pajak baru	100%	199,650,000

CASCADING BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KEPALA BADAN	
SASARAN	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
	Presentase SIUPA terhadap APBD
INDIKATOR SASARAN	Predikst Pengelolaan Keuangan
	Persentase Peningkatan PAD
Presentase SIUPA terhadap APBD	

BIDANG AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN		BIDANG ANGGARAN		BIDANG ASET		BIDANG PERBENDAHARAAN		BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN		BIDANG PENAGIHAN PAJAK	
SASARAN PROGRAM	Meningkatnya pelaporan keuangan tepat waktu	SASARAN PROGRAM	Terwujudnya waktu penetapan APBD Tersedianya Standarisasi Harga Barang dan Jasa Terwujudnya pelaksanaan dan Pengendalian APBD Terwujudnya Laporan Dana Transfer Tepat Waktu	SASARAN PROGRAM	Pengelolaan BMD yang Sesuai dengan Ketentuan	SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	SASARAN PROGRAM	Peningkatan Mutu Pengelolaan dan Pelayanan Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak	SASARAN PROGRAM	Meningkatnya Objek Pajak
INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Jumlah Dokumen LKPD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Jumlah Dokumen LKPD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Penatausahaan BMD Pemerintah yang memadai	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Capaian Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Peningkatan Target Pendapatan dari objek Pajak yang ada	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Persentase Objek Pajak yang dikelola
SUB BIDANG VERIFIKASI DAN PENCATATAN AKUNTANSI		SUB BIDANG PENYUSUNAN APBD DAN EVALUASI		SUB BIDANG PEMELIHARAAN DAN PEMANFAATAN		SUB BIDANG PERBENDAHARAAN		SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN		SUB BIDANG PENAGIHAN PAJAK	
SASARAN PROGRAM	Torlaksananya rekonsiliasi antara SKPD dan PPKD	SASARAN PROGRAM	Tersusunnya dokumen Ranperda dan Ranperkada tentang APBD Tersusunnya Dokumen Ranperda dan Ranperkada tentang Perubahan APBD Tersusunnya Standarisasi Harga	SASARAN PROGRAM	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran BMD Optimalisasi Pemanfaatan BMD Rekonsiliasi BMD	SASARAN PROGRAM	Terselenggaranya Pengelolaan kas daerah online dan aplikasi Informasi pencairan SP2D	SASARAN PROGRAM	Mengoptimalkan pengelolaan data, perhitungan Nilai Jual Objek Pajak dan Penetapan Pajak Daerah	SASARAN PROGRAM	Ekstensifikasi sumber-sumber Pajak Daerah
INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Jumlah dokumen Berita Acara Rekonsiliasi yang diterbitkan	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Jumlah Dokumen Ranperda dan Ranperkada APBD yang disusun Jumlah Dokumen Ranperda dan Ranperkada Perubahan APBD yang disusun Jumlah Dokumen Standarisasi Harga	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Jumlah Penelaahan RKMD dan RKPBMD Jumlah BMD yang dimanfaatkan Pihak Lain Jumlah DPD yang melaksanakan Rekonsiliasi	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Terbitnya SP2D	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Terdapatnya basis data PBB-P2, Restoran/umah Makan, Hotel, RumahKost, Hiburan dan Pajak Reklame Papan Nama (PRPN) Memberikan pelayanan maksimal terhadap Wajib Pajak Memaksimalkan perhitungan Nilai jual Objek Pajak dalam penentuan Surat Pembertahan Pajak daerah Terhutang (SPDOT) PBB-P2 dan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Pengalihan Objek Pajak baru
SUB BIDANG LAPORAN KEUANGAN		SUB BIDANG PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN APBD		SUB BIDANG INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI		SUB BIDANG BELANJA NON KEGIATAN		SUB BIDANG DOKUMENTASI DAN PENGOLAHAN DATA		SUB BIDANG PERTINGGAHAN PENYELESAIAN KEBERATAN	
SASARAN PROGRAM	Tersedianya Dokumen Ranperda/Ranperwa tentang Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	SASARAN PROGRAM	Tersedianya Dokumen DPA , DPPA dan SPD SKPD	SASARAN PROGRAM	Jumlah OPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Terlaksananya Sertifikasi Aset tetap Tanah	SASARAN PROGRAM	Terselenggaranya Pembinaan , Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan	SASARAN PROGRAM	Terlaksananya Pembayaran Jasa Bank Meningkatkan Kerjasama Pemkot dan Perbankan Menaaklalkan Potensial dan Target Penerimaan PAD	SASARAN PROGRAM	Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mengenai Perpajakan
INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Jumlah Dokumen Ranperda/Ranperkada tentang Pertanggungjawaban Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Dokumen DPA dan DPPA SKPD Dokumen Permohonan Permintaan SPO SKPD	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Jumlah BMD yang dilaksanakan Inventarisasi Jumlah Aset tetap Tanah yang di sertifikasi	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Tercapainya pemahaman perbendaharaan oleh SKPD, sinkronisasi data perbendaharaan dengan Institut terkait, pengelolaan dan penatausahaan perbendaharaan non kegiatan yang tertib	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Terpenuhinya Permintaan Jasa Transaksi Perbankan Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama Tercapainya Target Penerimaan PAD	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota yang mengatur Pajak Daerah
SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI SISTEM AKUNTANSI		SUB BIDANG DANA TRANSFER		SUB BIDANG PEMINDAHAN/ANGKUTAN DAN PENGHAPUSAN		SUB BIDANG PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH DAN DESA		SUB BIDANG PERHITUNGAN DAN PENERBITAN SURAT KETETAPAN		SUB BIDANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN	
SASARAN PROGRAM	Terlaksananya pembinaan Sistem Akuntansi SKPD Tersusunnya regulasi pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintah daerah	SASARAN PROGRAM	Laporan Realisasi Dana Transfer	SASARAN PROGRAM	Terlaksananya Penghapusan BMD Terlaksananya Pemindahtanganan BMD Terlaksananya Penilaian BMD	SASARAN PROGRAM	Terselenggaranya Pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah dan desa	SASARAN PROGRAM	Tersedianya Ranperda dan Perda, Ranperwa Dan Perwa Pemungutan Pajak Daerah Tercapainya Peningkatan Sumber - Sumber Pendapatan Pajak Daerah	SASARAN PROGRAM	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah
INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Jumlah pengelola keuangan SKPD yang diberikan bimbingan teknis penyusunan Jumlah dokumen peraturan kepala daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintah daerah	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Jumlah Laporan Sesuai Regulasi	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Jumlah penghapusan BMD yang tidak digunakan Jumlah Pemindahtanganan BMD Jumlah BMD yang dilaksanakan Penilaian	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Tercapainya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah dan desa	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Tersedianya Ranperda dan Perda Pemungutan Pajak Daerah Tersedianya Ranperwako dan Perwako Pemungutan Pajak Daerah Tersedianya Rancangan SK Kade dan SK Kade Tentang Pemungutan Pajak Daerah Pemutakhiran Data Base Wajib Pajak Daerah Penyelesaian Pengadilan Perpajakan Daerah	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Akurasi update Objek Pajak Daerah di lapangan

RENCANA AKSI ATAS KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	TAHAPAN	BULAN												PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	ANGGARAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Manajemen Barang Milik Daerah	1 <i>Opini BPK</i>	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase peningkatan Kualitas OPD dalam pneyusunan Laporan Keuangan	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

[illegible]

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	TAHAPAN	BULAN												PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	ANGGARAN
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						5 Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 6 Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 7 Penyampaian Keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada Gubernur 8 Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi 9 Penyampaian Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur														
			4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Dokumen Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 dokumen	1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan LKPD Audited 2 Penyampaian Ranperda/Ranperwa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 3 Pembahasan Ranperda/Ranperwa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4 Persetujuan Bersama Walikota dan DPRD atas Ranperda/Ranperwa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 5 Penyampaian Ranperda/Ranperwa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk dievaluasi oleh TAPD 6 Penyesuaian Ranperda/Ranperwa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai hasil evaluasi yang tercantum dalam SK Gubernur Provinsi Sulawesi Utara 7 Penetapan Ranperda/Ranperwa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah/Peraturan Walikota													BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	Rp 193,538,800

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	TAHAPAN	BULAN												PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	ANGGARAN
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						8 Penyalpaian Dokumen PERDA/PERWA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Gubernur Sulawesi Utara, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri														
			5	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	44 SKPD	1 Persiapan Aplikasi SIMDA untuk tahun berjalan												BIDANG ANGGARAN	Rp 83,368,800
							2 Verifikasi APBD													
							3 Pelaporan SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah)													
							4 Spending Mandatory APBD													
			6	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Meningkatnya Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Penyalpaian usulan RKBMD dan RKPBMĐ												BIDANG ASET DAERAH	Rp 272,038,640
							2 Telaah RKBMD dan RKPBMĐ													
							3 Persetujuan RKBMD dan RKPBMĐ													
							4 Laporan RKBMD dan RKPBMĐ													
							5 Pencatatan Barang oleh OPD													
							6 Rekonsiliasi Neraca BMD													
							7 Penyusunan Laporan BMD													
							8 Perhitungan Penyusutan BMD													
							9 Laporan BMD													

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	TAHAPAN	BULAN												PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	ANGGARAN		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			7 Revaluasi/ Appraisal Aset/Barang Daerah	Tersedianya Dokumen Revaluasi/ Appraisal Aset/Barang Daerah	1 dokumen	1	Penyampaian Usulan Penilaian												BIDANG ASET DAERAH	Rp 254,520,500		
						2	Inventarisasi BMD yang akan dinilai															
						3	Pengajuan Permohonan Penilaian															
						4	Penerbitan SK Tim Penilai															
						5	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian															
						6	Pelaksanaan Penilaian															
						7	Pembuatan Laporan Hasil Penilaian															
						8	Penyampaian Nilai Hasil Penilaian															
						9	Usulan Penetapan Nilai															
						10	SK Penetapan Nilai															
			8 Pengelolaan Kas Daerah Online dan Aplikasi Informasi Pencairan SP2D	Jumlah Transaksi Pemindahbukuan SP2D	25.000 Transaksi	1	Penyusunan Rencana pengelolaan kas daerah														BIDANG PERBENDAHARAAN	Rp 71,319,600
						2	Menyiapkan Pedoman															
						3	Konsultasi Teknis															
						4	Meneliti Dokumen SPP/SPM SKPD															
						5	Membuat Register SP2D															
						6	Melaksanakan Proses Penerbitan SP2D															
						7	Melaksanakan Rekonsiliasi Kas															
						8	Mengumpulkan Data															
						9	Menyusun dan Penyediaan Laporan															
			9 Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa	59 SKPD/Desa	1	Penyusunan Rencana pedoman pengelolaan keuangan daerah dan desa														BIDANG PERBENDAHARAAN	Rp 94,230,600
						2	Melengkapi Data															
						3	Mengumpulkan Bahan Regulasi															
						4	Membuat Draft Regulasi															
						5	Meneliti Dokumen Penatausahaan keuangan															
						6	Monitoring SKPD dan Desa															
						7	Melaksanakan Kegiatan Pembinaan ke SKPD dan Desa															
						8	Monitoring dan Back Up Aplikasi															
						9	Penyampaian Laporan ke Instansi Teknis															
						10	Koordinasi dengan Instansi teknis															
						11	Melakukan Update Aplikasi															
						12	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa															
			10 Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Daerah Yang tersertifikasi	30 Dokumen	1	Inventarisasi Aset yang Belum Bersertifikat														BIDANG ASET DAERAH	Rp 54,925,600
						2	Pencarian informasi keberadaan Aset															
						3	Penyusunan Dokumen Permohonan															
						4	Pengumpulan Alas Hak Aset															

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PRÓGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	TAHAPAN	BULAN												PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	ANGGARAN
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
						5	Dokumen Permohonan													
						6	Penyampaian Dokumen Permohonan													
						7	Pelaksanaan Pengukuran													
						8	Dokumen Sertifikat													
						9	Arsiparis Dokumen Sertifikat													

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	TAHAPAN	BULAN												PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	ANGGARAN	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			11 Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Cakupan Jumlah Barang Milik Daerah yang dihapus dan dipindahtanganan	44 SKPD	1 Usulan Pemindahtanganan													BIDANG ASET DAERAH	Rp 187,345,450	
						2 persetujuan pemindahtanganan															
						3 pelaksanaan pemindahtanganan															
						4 Risalah pemindahtanganan															
						5 usulan penghapusan															
						6 persetujuan penghapusan															
						7 SK Penghapusan															
			12 Penyusunan dan Penerbitan SPD	Jumlah SPD yang diterbitkan	10.000 Dokumen	1 Permohonan permintaan SPD														BIDANG ANGGARAN	Rp 13,168,100
						2 Penerbitan SPD															
						3 Penandatanganan SPD															
						4 Penyaluran SPD															
			13 Pengelolaan dan Pelaporan Dana Transfer	Tersedianya Laporan Dana Transfer	100%	1 Pelaporan DAK Fisik untuk tahun anggaran sebelumnya														BIDANG ANGGARAN	Rp 203,200,000
						2 Penginputan daftar kontrak DAK Fisik															
						3 Pelaporan Tahap I DAK Fisik															
						4 Pelaporan Tahap II DAK Fisik															
						5 Penyusunan Laporan DID tahun anggaran sebelumnya															
						6 Penyusunan Laporan DID Tahap I															
			14 Pembinaan , Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan, Perbendaharaan Non Kegiatan	Terwujudnya Pembinaan Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan, Perbendaharaan Non Kegiatan	1 dokumen	1 Menyiapkan dan merumuskan kebijakan, regulasi, norma, standar, pedoman dan kriteria														BIDANG PERBENDAHARAAN	Rp 104,216,900
						2 Pengadmnistrasi pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga															
						3 Rekonsiliasi penatusahaan perbendaharaan belanja non kegiatan															
						4 Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji															
						5 Mencetak daftar gaji PNS dan membuat laporan realisasi gaji PNS															
						6 Menyiapkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji															

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	TAHAPAN	BULAN												PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	ANGGARAN
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			15 Monitoring dan Evaluasi Sumber-sumber PAD	Jumlah Dokumen Evaluasi Sumber-sumber PAD	1 dokumen	1 Penyusunan rencana dan program kerja													BIDANG PENAGIHAN PAJAK	Rp 30,308,900
						2 Penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya														
						3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas														
			16 Pembinaan dan Pengendalian Teknis Sistem Akuntansi SKPD	Jumlah Penanggung Jawab Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan SKPD Yang Terfasilitasi	120 Orang	1 Pendampingan penginputan, rekonsiliasi dan penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Persediaan SKPD													BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	Rp 132,990,800
						2 Pendampingan verifikasi, rekonsiliasi dan penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Dana BOS SD/SMP														
						3 Rekonsiliasi dan Penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi Kas Bulanan SKPD														
						4 Penyusunan/Revisi Peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntansi Pemerintah Daerah														
						5 Penyusunan Aplikasi Barang Persediaan Pemerintah Kota Kotamobagu														
			17 Pengawasan, Penertiban dan Penyelesaian Keberatan Sumber-Sumber PAD	Meningkatnya Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak	90%	A. PERSIAPAN													BIDANG PENAGIHAN PAJAK	Rp 53,983,650
						1 Penyusunan rencana kerja sub bidang pengawasan, Penertiban, penyelesaian keberatan														
						2 Penyiapan perumusan kebijakan, norma, regulasi pada sub bidang pengawasan, penertiban, penyelesaian keberatan														
						B. PELAKSANAAN														
						1 Sosialisasi ke wajib pajak terkait regulasi perpajakan														
						2 Penelitian lapangan terkait kepatuhan wajib pajak daerah														
						3 Pemberian sanksi ketidakpatuhan wajib pajak daerah														
			18 Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Potensi Pajak	3 Objek	1 Pengumpulan Data objek pajak													BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN	Rp 639,750,000
						2 melakukan pendataan objek Pajak														
						3 Verifikasi data objek pajak														
						4 Cetak karcis														
						5 Rekonsiliasi PBB P2														
						6 Pendistribusian SPPT														
						7 Laporan Permintaan Data/realisasi														
			19 Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatam Asli Daerah	1 Jenis	1 Mengumpulkan data piutang pajak tahun n-1														Rp 199,650,000
						2 Menghitung piutang pajak per objek														
						3 Melakukan penagihan piutang pajak tahun n-1														
						4 Membuat laporan piutang pajak tahun n-1														

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	TAHAPAN	BULAN												PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	ANGGARAN		
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
						5	Melakukan penagihan pajak tahun n												BIDANG PENAGIHAN PAJAK			
						6	Mencari objek pajak baru															
						7	Membuat proyeksi capaian penerimaan pajak tahun n															
						8	Membuat proyeksi target penerimaan tahun n+1															
						9	Membuat laporan penerima pajak daerah bulanan															
			20	Jasa Transaksi Keuangan	Terbayarnya Jasa Transaksi Keuangan	42.857 Transaksi	1	Surat permintaan data transaksi													BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN	Rp 105,000,000
							2	Pengumpulan data														
							3	Pengolahan Data														
							4	Proses/pencairan Data transaksi														
							5	Laporan Realisasi transaksi														
			21	Pemutakhiran Data Objek dan Wajib Pajak Bumi dan Banguna, Pedesaan dan Perkotaan/Zona Nilai Tanah/Nilai Jual Objek Pajak/Peta Pajak dan Daftar Biaya Komponen Bangunan	Terciptanya Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	95%	1	Pengumpulan data objek pajak													BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN	Rp 1,039,363,200
							2	Observasi lapangan verifikasi data														
							3	Pengolahan data objek pajak														
							4	Penetapan objek pajak														
							5	Penyerahan objek pajak ke bidang penagihan														
							6	Laporan rekapitulasi wajib pajak per objek pajak														
			22	Kajian Perda/Perwa/SK/SOP dan Sosialisasi Perda/Perwa/SK/SOP Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Kesadaran, Kepatuhan dan Sadar Pajak	95%	A.	PERSIAPAN	■	■	■										BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN	Rp 77,577,850
							1	Perencanaan Kajian Perda/Perwa/SK/SOP	■	■	■											
							2	Pembentukan Tim Kajian	■	■	■											
							3	Analisis Kajian Teknis	■	■	■											
							B.	PELAKSANAAN														
							1	Persiapan permintaan/Pengumpulan Data				■	■	■	■	■	■					
							2	Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kajian Teknis Dan data			■	■	■	■	■	■	■					
3	Observasi dan Pelaksanaan Kegiatan Kajian								■	■	■	■	■	■	■	■						
4	Sosialisasi Regulasi Perpajakan	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
5	Pelaporan													■	■	■						
23	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan/Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Target Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan/Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan	Peningkatan Potensi Pajak Daerah	1	Penyusunan rencana dan program kerja	■	■	■										BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN	Rp 94,477,000			
				2	Konsultasi Teknis	■	■	■	■	■												
				3	Pemutakhiran Basis Data PBB-P2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
				4	Pengawasan/Pemeriksaan Lapangan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
				5	Entry data PBB-P2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
				6	Tabulasi Data PBB-P2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
				7	Penetapan PBB-P2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						

[illegible]

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET	TAHAPAN	BULAN												PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	ANGGARAN	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			24	Penyusunan Analisis Standar Belanja	Tersedianya dokumen standar belanja	1 dokumen	8	Rekonsiliasi Data												BIDANG ANGGARAN	Rp 193,885,431
							9	Laporan													
							1	Survei Harga Barang dan Jasa ke Pihak Ketiga													
							2	Permintaan Daftar Harga Barang dan Jasa Kepada OPD													
							3	Pembuatan SK Standarisasi Barang dan Jasa Pemkot Kotamobagu TA 2019													

Mengetahui,
PLT. KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
PEMBINA TKT I
NIP. 19681206 199403 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**

Jabatan : **PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Ir. TATONG BARA**

Jabatan : **WALIKOTA KOTAMOBAGU**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak Pertama

Hj. INONTAT MAKALALAG, SE

Pihak Kedua

Ir. Hj. TATONG BARA

REKAM MEDIS

Rekam medis adalah catatan tertulis mengenai keadaan kesehatan seseorang yang dibuat dan dipelihara secara sistematis dan teratur.

Rekam medis berfungsi sebagai alat komunikasi antara tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

Rekam medis adalah:

Rekam medis adalah catatan tertulis mengenai keadaan kesehatan seseorang yang dibuat dan dipelihara secara sistematis dan teratur.

Rekam medis adalah catatan tertulis mengenai keadaan kesehatan seseorang yang dibuat dan dipelihara secara sistematis dan teratur.

Rekam medis adalah catatan tertulis mengenai keadaan kesehatan seseorang yang dibuat dan dipelihara secara sistematis dan teratur. Rekam medis berfungsi sebagai alat komunikasi antara tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

Rekam medis adalah catatan tertulis mengenai keadaan kesehatan seseorang yang dibuat dan dipelihara secara sistematis dan teratur. Rekam medis berfungsi sebagai alat komunikasi antara tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

Rekam medis adalah:

Rekam medis

Rekam medis

Rekam medis

Rekam medis

Rekam medis

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)	Predikat Pengelolaan Keuangan	WTP
2	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	10%
3	Presentase SILPA terhadap APBD	Presentase SILPA terhadap APBD	2%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	342.478.975	
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.765.403.265	

Pihak Pertama



Hj. INONTAT MAKALALAG, SE

Pihak Kedua



Ir. Hj. TATONG BARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**

Jabatan : **SEKRETARIS BPKD KK**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**

Jabatan : **PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak Pertama

Hj. INONTAT MAKALALAG, SE

Pihak Kedua

Hj. INONTAT MAKALALAG, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	- Cakupan Layanan Administasi perkantoran	100 %
2.	Meningkatnya Peningkatan saran dan prasarana Aparatur	- Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	95 %

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	845.245.200	
2	Program Peningkatan saran dan prasarana Aparatur	76.988.600	

Pihak pertama



Hj. INONTAT MAKALALAG, SE

Pihak kedua



Hj. INONTAT MAKALALAG, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HELFRITS LAHIMADE, S.KOM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGGARAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**

Jabatan : **PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak pertama

HELFRITS LAHIMADE, S.KOM

Pihak kedua

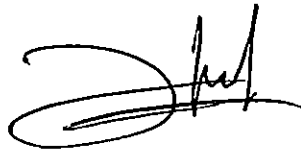
Hj. INONTAT MAKALALAG, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya waktu penetapan APBD	Penetapan APBD	Tepat Waktu
2	Terwujudnya pelaksanaan dan Pengendalian APBD	Persentase SKPD yang melakukan belanja tepat waktu	100%
3	Terwujudnya Laporan Dana Transfer Tepat Waktu	Laporan Dana Transfer	Tepat Waktu

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	729.960.475	

Pihak Pertama


HELFRITS LAHIMADE, S.KOM

Pihak Kedua


Hj. INONTAT MAKALALAG, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SAIFUDIN M. IMBAN, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN APBD DAN EVALUASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ROUSSY M. E. TEROK, SSI**

Jabatan : **STAF SUB BIDANG PENYUSUNAN APBD DAN EVALUASI**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak pertama

ROUSSY M. E. TEROK, SSI

Pihak kedua

SAIFUDIN M. IMBAN, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Standar Satuan Harga Barang / Jasa	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Barang / Jasa	1 Dok

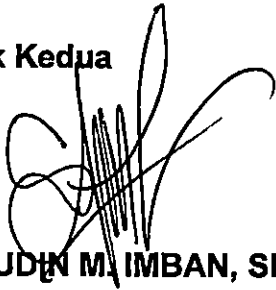
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyusunan Standar Satuan Harga	26.320.900	

Pihak Pertama



ROUSSY M. E. TEROK, SSI

Pihak Kedua



SAIFUDIN M. IMBAN, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SAIFUDIN M. IMBAN, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN APBD DAN EVALUASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **HELFRITS LAHIMADE, S.KOM**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGGARAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

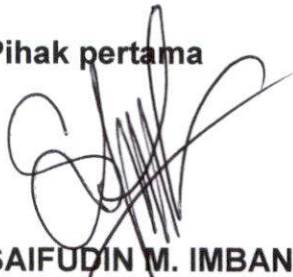
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

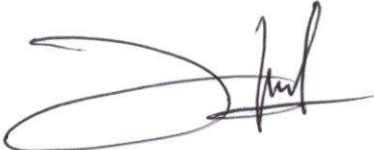
Kotamobagu,

2019

Pihak pertama


SAIFUDIN M. IMBAN, SE

Pihak kedua

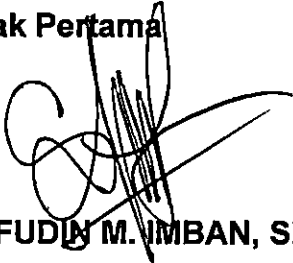

HELFRITS LAHIMADE, S.KOM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Dokumen RKA dan RKAP SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan RKAP SKPD	44 SKPD

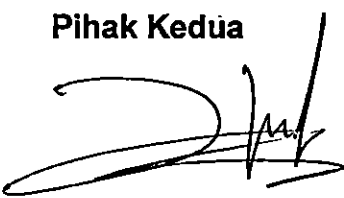
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET

Pihak Pertama



SAIFUDIN M. IMBAN, SE

Pihak Kedua



HELFRITS LAHIMADE, S.KOM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MOH. RISMAN MASLOMAN, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG DANA TRANSFER**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **HELFRITS LAHIMADE, S.KOM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGGARAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak pertama

MOH. RISMAN MASLOMAN, SE

Pihak kedua

HELFRITS LAHIMADE, S.KOM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Laporan Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Realisasi	5 Jenis

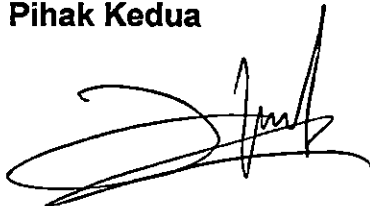
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyusunan system informasi pengelolaan keuangan daerah	89.613.000	
2	Pengelolaan dan Pelaporan dana transfer	192.200.000	

Pihak Pertama



MOH. RISMAN MASLOMAN, SE

Pihak Kedua



HELFRITS LAHIMADE, S.KOM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SRI PURNOMO NINGSIH K, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN APBD**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **HELFRITS LAHIMADE, S.KOM**
Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGGARAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak pertama

SRI PURNOMO NINGSIH K, SE

Pihak kedua

HELFRITS LAHIMADE, S.KOM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Dokumen DPA dan DPPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA dan DPPA SKPD	44 SKPD

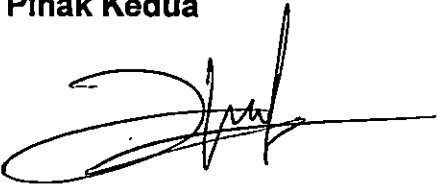
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	226.717.375	
2	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD	181.941.100	
3	Penyusunan dan penerbitan SPD	13.168.100	

Pihak Pertama



SRI PURNOMO NINGSIH K, SE

Pihak Kedua



HELFRITS LAHIMADE, S.KOM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**

Jabatan : **PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

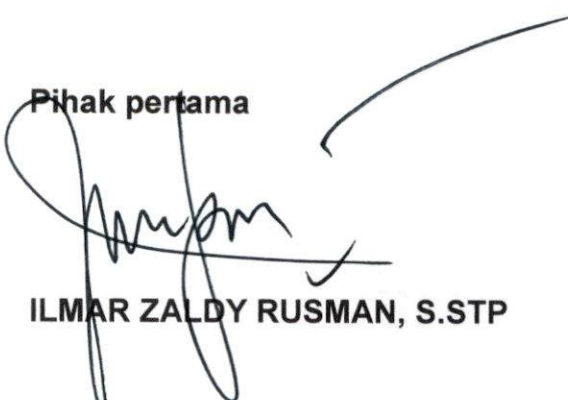
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak pertama


ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP

Pihak kedua

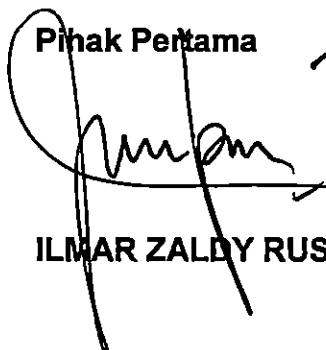

Hj. INONTAT MAKALALAG, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pengkinian Data Objek Pajak	Pemenuhan Database Objek Pajak yang factual	15%
2	Pengelolaan Data Singkronisasi Data Berbasis IT	Pengadaan Sistem Pengelolaan Pajak secara elektronik	20%
3	Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan Target Pendapatan dari Objek Pajak yang ada	100%

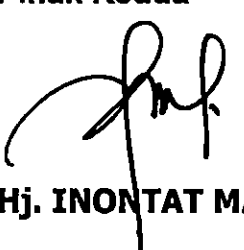
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.570.020.550	

Pihak Pertama



ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP

Pihak Kedua



Hj. INONTAT MAKALALAG, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YUSNAR O. MALURENG, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN DAN PENGADUAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama

YUSNAR O. MALURENG, SE

Pihak kedua

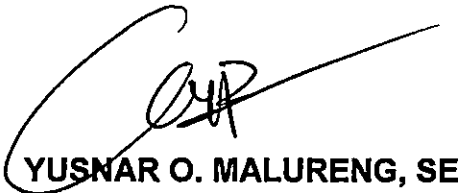
ILMAR ZALDI RUSMAN, S.STP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

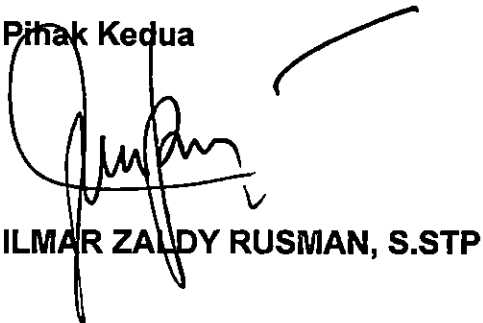
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan target Pendapatan dari Objek Pajak yang ada	3000 OP

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Kajian Perda/Perwa/SK/SOP dan Sosialisasi Perda/Perwa/SK/SOP Pajak dan Retribusi Daerah	77.577.850	
2	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan / Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan	83.477.000	

Pihak Pertama


YUSNAR O. MALURENG, SE

Pihak Kedua


ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SARIF BINOL, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN, PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak pertama

SARIF BINOL, SE

Pihak kedua

ILMAR ZALDI RUSMAN, S.STP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pendataan Massal Objek Pajak	Jumlah Objek Pajak yang terdata	25%

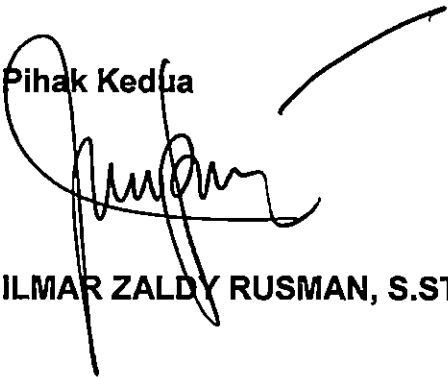
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pemutahiran Datra Objek dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan / Zona Nilai Tanah / Nilai Jual Objek Pajak / Peta Pajak dan Daftar Biaya Komponen Bangunan	1.052.466.200	

Pihak Pertama



SARIF BINOL, SE

Pihak Kedua



ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **IRMA DAENG ALI, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN DAN PENGOLAHAN DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama

IRMA DAENG ALI, SE

Pihak kedua

ILMAR ZALDI RUSMAN, S.STP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pengadaan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemenuhan Sistem Pengelolaan Pendapatan Daerah berbasis aplikasi	1 Sistem
2	Intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan Target Pendapatan dari Objek yang ada	3000 OP

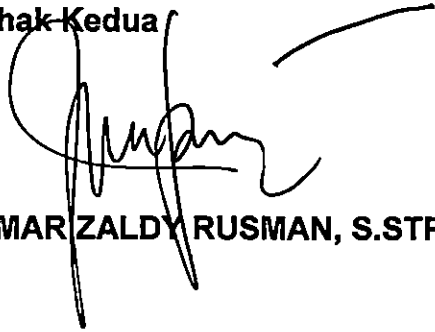
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Jasa Transaksi Keuangan	149.999.500	
2	Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	206.500.000	

Pihak Pertama



IRMA DAENG ALI, SE

Pihak Kedua



ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE**

Jabatan : **KABID PERBENDAHARAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak Pertama,

SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

Pihak Kedua,

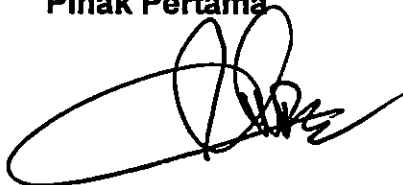
Hj. INONTAT MAKALALAG, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Pengelolaan Daerah Opini Keuangan	WTP

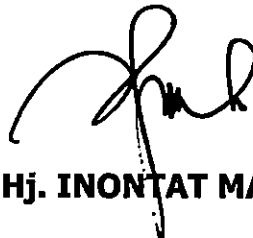
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	244.439.900	

Pihak Pertama



SAYFRUDIN SALEH ABAS, SE

Pihak Kedua



Hj. INONTAT MAKALALAG, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **TELI TONGKASI, SE**

Jabatan : **KASUBID BELANJA NON KEGIATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE**

Jabatan : **KABID PERBENDAHARAAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak Kedua,

SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

Pihak Pertama,

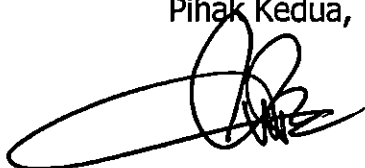
TELI TONGKASI, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pembinaan , Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan	Tercapainya pemahaman perbendaharaan oleh SKPD, sinkronisasi data perbendaharaan dengan institusi terkait, pengelolaan dan penatausahaan perbendaharaan non kegiatan yang tertib	44 SKPD

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan Perbendaharaan Non Kegiatan	104.216.900	

Pihak Kedua,



SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

Pihak Pertama,



TELI TONGKASI, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **OLFI KASEUNAUNG, SE**

Jabatan : **KASUBID PERBENDAHARAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE**

Jabatan : **KABID PERBENDAHARAAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak Kedua,

SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

Pihak Pertama,

OLFI KASEUNAUNG, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pengelolaan kas daerah online dan aplikasi informasi pencairan SP2D	Jumlah SP2D	25.000 lembar
2.	Terselenggaranya Pembinaan, koordinasi, pengelolaan dan penatausahaan perbendaharaan	Tercapainya pemahaman perbendaharaan oleh SKPD, sinkronisasi data perbendaharaan dengan institusi terkait, pengelolaan dan penatausahaan perbendaharaan yang tertib	44 SKPD

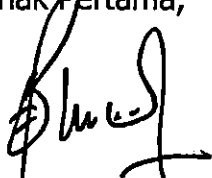
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pengelolaan kas daerah online dan aplikasi informasi pencairan SP2D	71.319.600	

Pihak Kedua,



SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

Pihak Pertama,



OLFI KASEUNAUNG, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ADI SUTRISNO MOKOAGOW, SE**

Jabatan : **KASUBID PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH DAN DESA**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE**

Jabatan : **KABID PERBENDAHARAAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak Kedua,

(SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE)

Pihak Pertama,

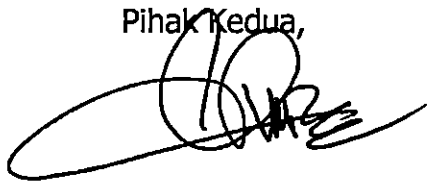
(ADI SUTRISNO MOKOAGOW, SE)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	Tercapainya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah	15 Desa

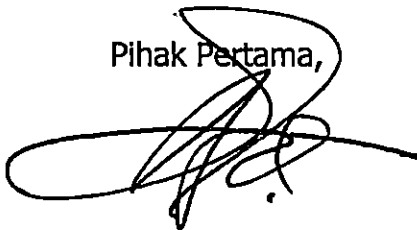
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa	68.903.400	

Pihak Kedua,



SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

Pihak Pertama,



ADI SUTRISNO MOKOAGOW, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HAMKA DAUN, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**
Jabatan : **PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama



HAMKA DAUN, SE

Pihak kedua



Hj. INONTAT MAKALALAG, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Objek Pajak	Presentase Objek Pajak yang dikelola	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	220.912.550	

Pihak Pertama



HAMKA DAUN, SE

Pihak Kedua



Hj. INONTAT MAKALALAG, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD ROKHZALI BONDE, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN PAJAK**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **HAMKA DAUN, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama


AKHMAD ROKHZALI BONDE, SE

Pihak kedua


HAMKA DAUN, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Ekstensifikasi sumber-sumber Pajak Daerah	Penagihan Objek Pajak baru	100%

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	141.020.000	

Pihak Pertama



AKHMAD ROKHZALI BONDE, SE

Pihak Kedua



HAMKA DAUN, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RINRA S. S. LAMAKA, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN TINDAK LANJUT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **HAMKA DAUN, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak pertama

RINRA S. S. LAMAKA, SE

Pihak kedua

HAMKA DAUN, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARYANTO MAMONTO, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN, PENYELESAIAN
KEBERATAN DAN PENERTIBAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **HAMKA DAUN, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak pertama



ARYANTO MAMONTO, SE

Pihak kedua



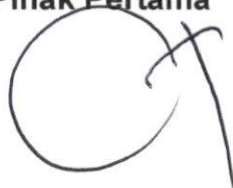
HAMKA DAUN, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mengenai Perpajakan	Penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota yang mengatur Pajak Daerah	100%

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pengawasan, Penertiban dan Penyelesaian dan Penyelesaian Keberatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	23.583.650	

Pihak Pertama



ARYANTO MAMONTO, SE

Pihak Kedua



HAMKA DAUN, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **Hj. INONTAT MAKALALAG, SE**
Jabatan : **PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak pertama

PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si

Pihak kedua

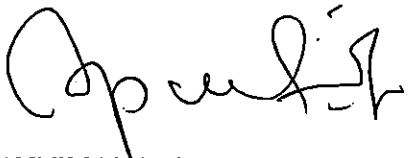
Hj. INONTAT MAKALALAG, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	Tepat Waktu / Tidak	Tepat Waktu

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	342.478.975	
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	173.579.600	

Pihak Pertama



PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si

Pihak Kedua



Hj. INONTAT MAKALALAG, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL RIFAI BAMBELA, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI
SISTEM AKUNTANSI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak pertama


ABDUL RIFAI BAMBELA, SE

Pihak kedua


PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

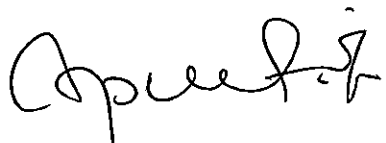
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pembinaan Sistem Akuntansi Persediaan SKPD	Jumlah SKPD yang telah diberikan pembinaan tentang Sistem Akuntansi Persediaan SKPD	44 SKPD

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pembinaan dan pengendalian teknis system akuntansi SKPD	42.840.800	

Pihak pertama


ABDUL RIFA'I BAMBELA, SE

Pihak kedua


PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **LAYLA F. TAWIL, S.KOM**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak pertama

LAYLA F. TAWIL, S.KOM

Pihak kedua

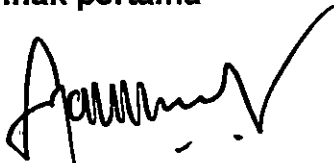
PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Dokumen LKPD	Jumlah Dokumen LKPD	1 Dok

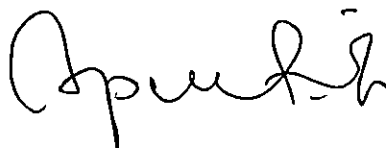
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	342.478.975	

Pihak pertama



LAYLA F. TAWIL, S.KOM

Pihak kedua



PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YUDI C. PAPUTUNGAN, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG VERIFIKASI DAN PENCATATAN
AKUNTANSI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si**
Jabatan : **KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak pertama

YUDI C. PAPUTUNGAN, SE

Pihak kedua

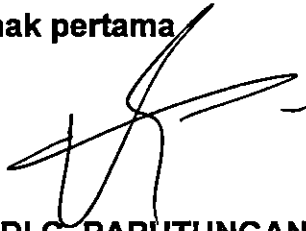
PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen

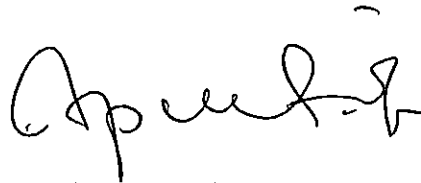
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	130.738.800	

Pihak pertama



YUDI C. PAPUTUNGAN, SE

Pihak kedua



PUTIK EMAS ABDULLAH, S.STP, M.Si



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RINDAH MOKOGINTA, SE,M.Ec.Dev**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN DOKUMEN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **PRA SUGIARTO YUNUS, SP**
Jabatan : **PLT. KEPALA BIDANG ASET DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak pertama

RINDAH MOKOGINTA, SE,M.Ec.Dev

Pihak kedua

PRA SUGIARTO YUNUS, SP

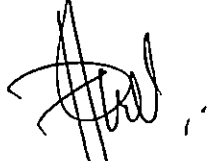
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya inventarisasi BMD	Jumlah BMD yang dilaksanakan Inventarisasi	45 OPD
2.	Terlaksananya Sertifikasi Aset tetap Tanah	Jumlah Aset tetap Tanah yang di sertifikasi	15 Bidang

No.	SASARAN KEGIATAN	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
1	Validasi Data BMD	Laporan Inventarisasi BMD alat ukur : 1. Data BMD 2. Data yang di inventarisasi 3. Jumlah SKPD	1. Nilai Aset : Rp. 1.626.824.479.698,71 2. 45 OPD
2	Pengamanan BMD berupa Aset Tetap Tanah	Sertipikat Hak Pakai Atas Nama Pemda Alat Ukur : Dokumen Sertipikat	15 Bidang

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Sensus BMD	0	
2	Pengamanan barang milik daerah	54.925.600	

Pihak Pertama



RINDAH MOKOGINTA, SE,M.Ec.Dev

Pihak Kedua



PRA SUGIARTO YUNUS, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **CHRISTOFEL KOBANDAHA, ST**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP**

Jabatan : **Pih. KEPALA BIDANG ASET DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak pertama

CHRISTOFEL KOBANDAHA, ST

Pihak kedua

PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran BMD	Jumlah Penelaahan RKBMD dan RKPBM	45 OPD
2	Optimalisasi Pemanfaatan BMD	Jumlah BMD yang dimanfaatkan Pihak Lain	8 Unit
3	Rekonsiliasi BMD	Jumlah OPD yang melaksanakan Rekonsiliasi	120 UPB

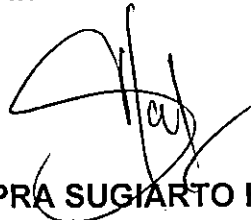
No.	SASARAN KEGIATAN	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
1	Data Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang	Laporan RKBMD dan RKPBM alat ukur : Dokumen RKBMD dan RKPBM	45 OPD
2	Bentuk Pemanfaatan BMD	Dokumen Pemanfaatan Alat Ukur : 1. Dokumen Pinjam Pakai 2. Dokumen Sewa	6 Dokumen 2 Dokumen
3.	Neraca BMD	KIB dan Laporan BMD Alat Ukur: Dokumen	2 Dokumen

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Rp. 272.038.640,-	

Pihak Pertama

CHRISTOFEL KOBANDAHA, ST

Pihak Kedua



PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **WAHYUDI IMAN, S. Sos**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PEMINDAHTANGANAN DAN
PENGHAPUSAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **PRA SUGIARTO YUNUS, SP**

Jabatan : **PLT. KEPALA BIDANG ASET DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2019

Pihak pertama

WAHYUDI IMAN, S. Sos

Pihak kedua

PRA SUGIARTO YUNUS, SP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Penghapusan BMD	Jumlah penghapusan BMD yang tidak digunakan	80% dari usulan SKPD
2	Terlaksananya Pemindahtanganan BMD	Jumlah Pemindahtanganan BMD	80% dari usulan SKPD
3	Terlaksananya Penilaian BMD	Jumlah BMD yang dilaksanakan Penilaian	327 Unit

No.	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
1	Terlaksananya Penghapusan BMD sesuai usulan	Data BMD yang dihapuskan Alat Ukur : SK Penghapusan	80% dari usulan SKPD
2	Terlaksananya Pemindahtanganan BMD	Data BMD yang dipindahtanganan Alat Ukur : Dokumen Persetujuan Pemindahtanganan	80% dari usulan SKPD
3	Revaluasi BMD untuk kebutuhan Neraca dan Pemindahtanganan	Laporan Hasil Penilaian Alat Ukur : Dokumen Hasil Penilaian	327 Dokumen

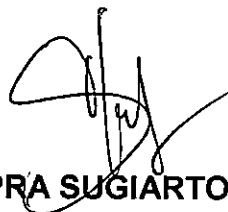
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	187.345.450	
2	Revaluasi/ Appraisal/ BMD	254.520.500	

Pihak Pertama



WAHYUDI IMAN, S. Sos

Pihak Kedua



PRA SUGIARTO YUNUS, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP

Jabatan : Plh. KEPALA BIDANG ASET DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Hj. INONTAT MAKALALAG, SE

Jabatan : Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2019

Pihak Kedua,

Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
NIP. 19681206199403 2 008

Pihak Pertama,

PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP
NIP. 19830308 200604 1 010

TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPALA BIDANG ASET DAERAH

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Pengelolaan BMD yang Sesuai dengan Ketentuan	Penatausahaan BMD Pemerintah yang memadai	Total BMD Pemkot

No.	SASARAN PROGRAM	HASIL KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Berkurangnya Temuan Atas Pengelolaan Aset Daerah Alat Ukur: Nilai Temuan	<Rp10.000.000.000,-

NO.	PROGRAM	ANGGARAN Rp.	KET
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	826.490.190	

Kotamobagu,

2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Hj. INONTAT MAKALALAG, SE
NIP. 19681206 199403 2 008



PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP
NIP. 19830308 200604 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Dra. SCHERLY ABDULLAH**

Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

PIHAK PERTAMA

Dra. SCHERLY ABDULLAH

PIHAK KEDUA

PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP

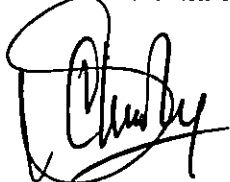
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administasi perkantoran	100 %
2.	Meningkatnya Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur	95 %

NO	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran Alat Ukur : Jumlah jenis dokumen dan surat yang diarsipkan	100 %
2.	Meningkatnya Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur. Alat Ukur : Jumlah Aset yang terpelihara	95 %

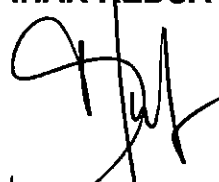
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	2	3	4
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	644.724.900,-	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	76.988.600,-	

PIHAK PERTAMA



Dra. SCHERLY ABDULLAH

PIHAK KEDUA



PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **GRESLY Y. R. MAMELO, S.Kom. MSA**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGGARAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak pertama

GRESLY Y. R. MAMELO, S.KOM, MSA

Pihak kedua

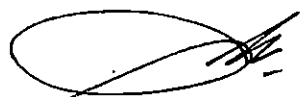
PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya waktu penetapan APBD	Penetapan APBD	Tepat Waktu
2	Terwujudnya pelaksanaan dan Pengendalian APBD	Persentase SKPD yang melakukan belanja tepat waktu	100%
3	Terwujudnya Laporan Dana Transfer Tepat Waktu	Laporan Dana Transfer	Tepat Waktu

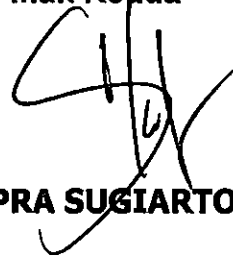
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	796.949.032	

Pihak Pertama



GRESLY Y. R. MAMELO, S.Kom. MSA

Pihak Kedua



PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **CHRISTINE IMBAN, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

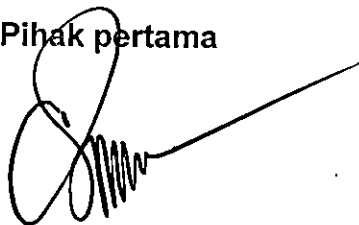
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

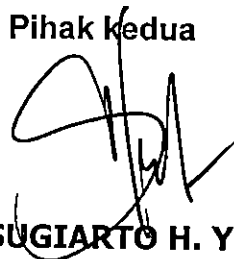
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, . . . 2020

Pihak pertama


CHRISTINE IMBAN, SE

Pihak kedua


PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP

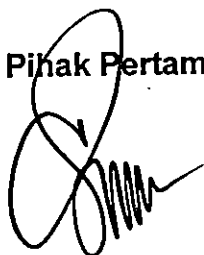
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen LKPD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	4 Dokumen

No.	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketepatan waktu	Tepat Waktu

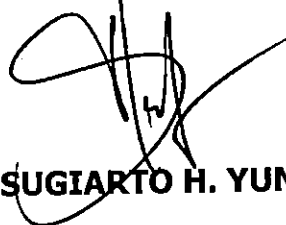
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	286.477.875,-	
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	363.887.550,-	

Pihak Pertama



CHRISTINE IMBAN, SE

Pihak Kedua



PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MOH. RISMAN MASLOMAN, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP,**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

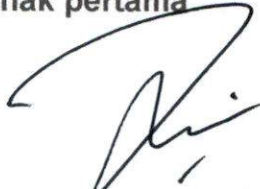
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

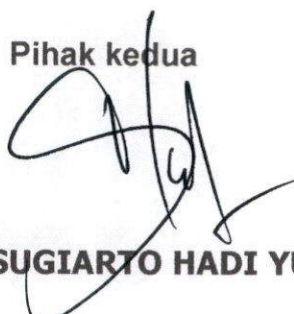
Kotamobagu,

2020

Pihak pertama


MOH. RISMAN MASLOMAN, SE

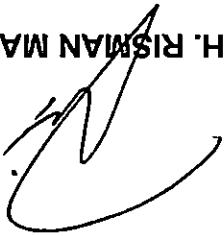
Pihak kedua


PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyusun rencana dan program kerja sub bidang penagihan pajak	1. Membuat matriks penagihan pajak bulanan	90 %
2	Melakukan penagihan pajak daerah yang telah melampaui jatuh tempo	1. Mengunjungi seluruh wajib pajak yang belum membayar pajak yang telah melampaui jatuh tempo	90%
3.	Memproses kadaluarsa penghapusan tunggakan	1. Melakukan verifikasi terhadap objek pajak yang layak dilakukan penghapusan tunggakan	75 %
4.	Melakukan evaluasi kinerja Pengawasan dan Penertiban Subjek/Objek Pajak Daerah	1. Penggunaan Taping Box	90 %
		2. Penertiban reklame dan objek pajak yang tidak membayar pajak bersama instansi terkait	90 %
5.	Melakukan Evaluasi Kinerja Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak Daerah	1. Penyelesaian Keberatan terhadap penetapan PBB	90 %
6.	Monitoring dan Evaluasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Akurasi update objek pajak daerah dilapangan	90 %

No.	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Menyusun rencana dan program kerja sub bidang penagihan pajak	Keteraturan kegiatan penagihan pajak daerah Alat Ukur : -Realisasi Pajak - Daerah periodik	90 %
2.	Melakukan penagihan pajak daerah yang telah melampaui jatuh tempo	Penyerahan SKPD secara langsung dan melakukan penagihan di tempat wajib	90 %



Pihak Kedua

Pihak Pertama

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	302.598.100,-	
3	memproses kadaluarsa penghapusan tunggakan	1. Verifikasi data, status dan kedudukan objek/wajib pajak. Alat Ukur : Rekomendasi penghapusan tunggakan	75 %
4.	Melakukan evaluasi kinerja Pengawasan dan Penertiban Subjek/Objek Pajak Daerah	1. Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah Alat Ukur : Melakukan Investigasi 2. Memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku Alat Ukur : Regulasi pajak daerah	90%
5.	Melakukan Evaluasi Kinerja Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak Daerah	1. Menindaklanjuti keluhan dan keberatan wajib pajak daerah Alat Ukur : Melakukan verifikasi atas bukti keluhan wajib pajak daerah	90 %
6.	Monitoring dan Evaluasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Berkurangnya penunggak pajak Alat Ukur : Investigasi lapangan	90 %



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE**

Jabatan : **KABID PERBENDAHARAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak Pertama,

SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

Pihak Kedua,

PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP

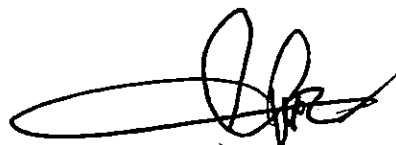
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP

No.	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa <u>Alat Ukur :</u> 1. Menurunnya Tingkat Kesalahan Dokumen SPJ (%) 2. Penyusunan APBDes 3. Realisasi SP2D	100 Persen 15 Buku 15.500 Dokumen

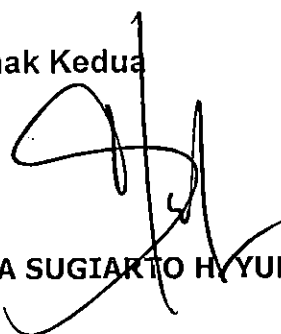
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	268.577.525	

Pihak Pertama



SAYFRUDIN SALEH ABAS, SE

Pihak Kedua



PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG D. TOMBAAN, SE

Jabatan : KEPALA BIDANG ASET DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP

Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak Kedua,

PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP
NIP. 19830308 200604 1 010

Pihak Pertama,

BAMBANG D. TOMBAAN, SE
NIP. 19880222 200902 1 001

TABEL PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPALA BIDANG ASET DAERAH

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Penatausahaan, Pengendalian dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Persentase Manajemen Barang Milik Daerah Pemerintah Kotamobagu	80 % dari Total BMD Pemerintah Kotamobagu

No.	SASARAN PROGRAM	HASIL KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Peningkatan Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Berkurangnya Temuan Atas Pengelolaan Aset Daerah Alat Ukur: Nilai Temuan	<Rp10.000.000.000,-

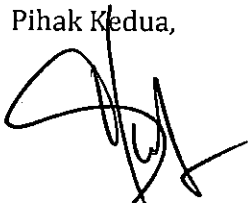
NO.	PROGRAM	ANGGARAN Rp.	KET
1.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	623.658.275	

Kotamobagu,

2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



PRA SUGIARTO HADI YUNUS, SP
NIP. 19830308 200604 1 010



BAMBANG D. TOMBAAN, SE
NIP. 19880222 200902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP**

Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak pertama

ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP

Pihak kedua

PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pencetakan dan pendistribusian SPPT PBB-P2	Penyampaian SPPT PBB-P2 sesuai dengan rencana kerja	100%
2	Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Peningkatan Target Pendapatan dari Objek Pajak yang ada	100%
3	Pemutakhiran Data PBB-P2 Kotamobagu Utara	Tersedianya data PBB-P2 Kota mobagu Utara yang faktual	100%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.476.776.575	

Pihak Pertama

ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP

Pihak Kedua

PRA SUGIARTO H. YUNUS, SP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SAIFUDIN M. IMBAN, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN APBD DAN EVALUASI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **GRESLY Y. R. MAMELO, S.Kom. MSA**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGGARAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

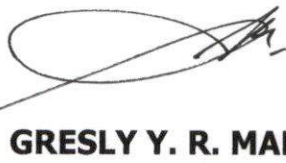
2020

Pihak pertama



SAIFUDIN M. IMBAN, SE

Pihak kedua



GRESLY Y. R. MAMELO, S.Kom. MSA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Dokumen RKA dan RKAP SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan RKAP SKPD	44 SKPD

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	290.142.157	
2	Penyusunan Standarisasi Barang dan Jasa	15.814.400	

Pihak Pertama



SAIFUDIN M. IMBAN, SE

Pihak Kedua



GRESLY Y. R. MAMELO, S.Kom. MSA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ROUSSY M. E. TEROK, S.SI**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG DANA TRANSFER**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **GRESLY Y. R. MAMELO, S.Kom, M.S.A**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGGARAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak pertama

ROUSSY M. E. TEROK, S.SI

Pihak kedua

GRESLY Y. R. MAMELO, S.Kom, M.S.A

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Laporan Realisasi Dana Transfer	Jumlah Laporan Sesuai Regulasi	5 Jenis

No.	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET
1	Laporan Realisasi Dana Transfer	Terealisasinya dana transfer tepat waktu Alat Ukur : 1. Jumlah Dana Transfer Sesuai Pagu 2. Jumlah Dana Sesuai Nilai Kontrak	100%

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	85.703.300	
2	Pengelolaan dan Pelaporan dana transfer	206.362.100	

Pihak Pertama



ROUSSY M. E. TEROK, S.SI

Pihak Kedua



GRESLY Y. R. MAMELO, S.Kom,M.S.A



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SRI PURNOMO NINGSIH K, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PELAKSANAAN DAN
PENGENDALIAN APBD**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **GRESLY Y.R MAMELO, S.KOM, MSA**
Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGGARAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, . 2020

Pihak pertama

SRI PURNOMO NINGSIH K, SE

Pihak kedua

GRESLY Y.R MAMELO, S.KOM, MSA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Dokumen DPA , DPPA dan SPD SKPD	Dokumen DPA dan DPPA SKPD Dokumen Permohonan Permintaan SPD SKPD	95% 95%
2.	Tersedianya Dokumen Pergeseran Anggaran SKPD	Dokumen Permohonan Pergeseran Anggaran dari SKPD	95%

No.	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
1	Tersedianya Dokumen DPA , DPPA dan SPD SKPD	Adanya Penerbitan/Permintaan DPA, DPPA dan SPD Alat Ukur : Jumlah Dokumen DPA,DPPA SPD	95% 95%
2	Tersedianya Dokumen Pergeseran Anggaran SKPD	Dokumen Pergeseran Anggaran SKPD	95%

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	Penyusunan dan penerbitan SPD	12.636.975	

Pihak Pertama



SRI PURNOMO NINGSIH K, SE

Pihak Kedua



GRESLY Y.R MAMELO, S.KOM, MSA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YUDI C. PAPUTUNGAN, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG VERIFIKASI DAN PENCATATAN
AKUNTANSI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **CHRISTINE IMBAN, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak pertama

YUDI C. PAPUTUNGAN, SE

Pihak kedua

CHRISTINE IMBAN, SE

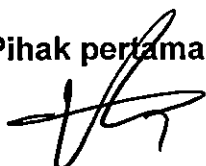
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya rekonsiliasi antara SKPD dan PPKD	Jumlah dokumen Berita Acara Rekonsiliasi yang diterbitkan	540 BAR Kas 180 BAR Persediaan 2 BAR kolektif Dana BOS
2	Tersedianya Dokumen Ranperda/Ranperwa tentang Pertanggungjawaban APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Ranperda/Ranperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen

No.	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Rekonsiliasi SKPD dan PPKD	Kesesuaian dan Ketepatan nilai akun kas dan persediaan yang disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD Alat ukur : Jumlah dokumen Laporan Keuangan	45 SKPD
2	Tersedianya Dokumen Ranperda/Ranperwa tentang Pertanggungjawaban APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Terpenuhinya kewajiban pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan perundang-undangan Alat ukur : Ketepatan waktu Pemotongan/penundaan DAU	Tepat waktu Jumlah Dana

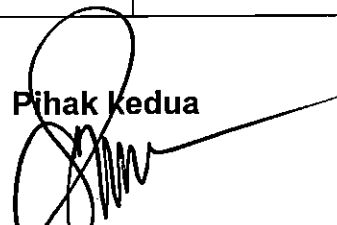
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rp. 206.207.275,00	

Pihak pertama



YUDI C. PAPUTUNGAN, SE

Pihak kedua



CHRISTINE IMBAN, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **LAYLA F. TAWIL, S.KOM**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **CHRISTINE IMBAN, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak pertama

LAYLA F. TAWIL, S.KOM

Pihak kedua

CHRISTINE IMBAN, SE

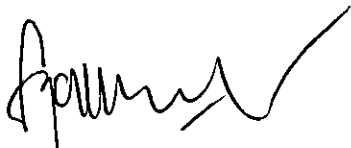
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Dokumen

No.	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kewajiban pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Alat ukur : Ketepatan waktu	Tepat waktu

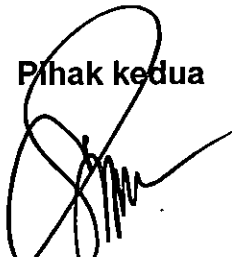
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun	Rp. 363.887.550,00	

Pihak pertama



LAYLA F. TAWIL, S.KOM

Pihak kedua



CHRISTINE IMBAN, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **KASMAN DOLLAH, S.Kom, MSA**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN DAN EVALUASI
SISTEM AKUNTANSI**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **CHRISTINE IMBAN, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak pertama

KASMAN DOLLAH, S.Kom, MSA

Pihak kedua

CHRISTINE IMBAN, SE

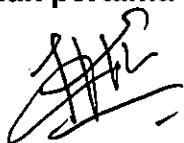
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pembinaan Sistem Akuntansi SKPD	Jumlah pengelola keuangan SKPD yang diberikan pembinaan system akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan	120 orang
2	Tersusunnya regulasi pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah dokumen peraturan kepala daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan dan akuntansi pemerintah daerah	2 dok

No.	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pembinaan Sistem Akuntansi SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD tepat waktu Alat ukur : Persentase dokumen LK SKPD yang disampaikan tepat waktu Formula : Jumlah SKPD tepat waktu/Jumlah SKPD	100%
2	Tersusunnya regulasi pengelolaan keuangan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Tersedianya pedoman/acuan dalam pengelolaan keuangan dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah sesuai kebutuhan Alat ukur : Jumlah dokumen	2 dok

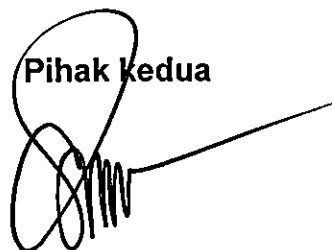
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pembinaan dan Pengendalian Teknis Sistem Akuntansi SKPD	Rp. 80.270.600,-	

Pihak pertama



KASMAN DOLLAH, S.Kom

Pihak kedua



CHRISTINE IMBAN, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **WIRIAKUSUMA PAPUTUNGAN, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN, PENYELESAIAN
KEBERATAN DAN PENERTIBAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **MOH. RISMAN MASLOMAN, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak pertama

WIRIAKUSUMA PAPUTUNGAN, SE

Pihak kedua

MOH. RISMAN MASLOMAN, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pengawasan Subjek/Objek Pajak Daerah	1. Penggunaan Taping Box	90%
2	Penertiban terhadap Subjek/Objek pajak daerah	1. Penertiban reklame dan objek Objek pajak yang tidak membayar pajak bersama Instansi Terkait	90 %
3	Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak Daerah	1. Penyelesaian Keberatan terhadap penetapan PBB	90 %

No.	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
1	Pengawasan Subjek/Objek Pajak Daerah	1. Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah Alat Ukur : - Melakukan Investigasi	90%
2	Penertiban terhadap Subjek/Objek pajak daerah	1. Memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku Alat Ukur : - Regulasi pajak daerah	90 %
3	Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak Daerah	1. Menindaklanjuti keluhan dan keberatan wajib pajak daerah Alat Ukur : - Melakukan verifikasi atas bukti keluhan wajib pajak daerah	90 %

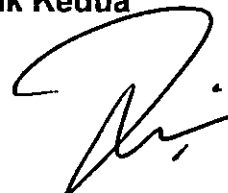
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pengawasan, Penertiban dan Penyelesaian Keberatan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	93.630.600	

Pihak Pertama



WIRIAKUSUMA PAPUTUNGAN, SE

Pihak Kedua



MOH. RISMAN MASLOMAN, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL RIFAI BAMBELA, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN TINDAK LANJUT**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **MOH. RISMAN MASLOMAN, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

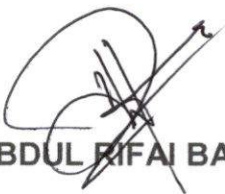
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

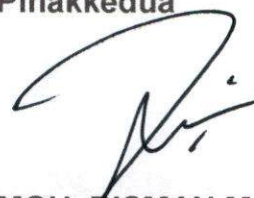
2020

Pihakpertama



ABDUL RIFAI BAMBELA, SE

Pihakkedua



MOH. RISMAN MASLOMAN, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Akurasi update Objek Pajak Daerah di lapangan	90%

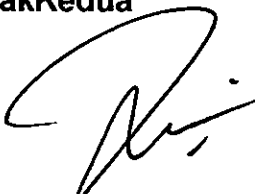
No.	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET
1	Monitoring dan Evaluasi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Berkurangnya penunggak pajak Alat ukur : - Investigasi Lapangan	90%

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Monitoring dan Evaluasi Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah	20.382.800	

PihakPertama


ABDUL RIFA'I BAMBELA, SE

PihakKedua


MOH. RISMAN MASLOMAN, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD ROKHZALI BONDE, SE**

Jabatan : **PLT.KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **MOH. RISMAN MASLOMAN, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENAGIHAN PAJAK**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak pertama

AKHMAD ROKHZALI BONDE, SE

Pihak kedua

MOH. RISMAN MASLOMAN, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menyusun rencana dan program kerja sub bidang penagihan pajak	Membuat matriks penagihan pajak bulanan	90%
2	Melakukan penagihan Pajak Daerah yang telah melampaui jatuh tempo.	Mengunjungi seluruh wajib pajak yang belum membayar pajak yang telah melampaui jatuh tempo.	90 %
3	Memproses kadaluarsa dan penghapusan tunggakan	Melakukan verifikasi terhadap objek pajak yang layak dilakukan penghapusan tunggakan	90 %

No.	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
1	Menyusun rencana dan program kerja sub bidang penagihan pajak	Keteraturannya kegiatan penagihan pajak daerah Alat ukur : - Realisasi Pajak Daerah Periodik	90%
2	Melakukan penagihan Pajak Daerah yang telah melampaui jatuh tempo.	Penyerahan SKPD secara langsung dan melakukan penagihan di tempat wajib pajak Alat Ukur : - SKPD terbayar	90 %
3	Memproses kadaluarsa dan penghapusan tunggakan	Verifikasi data, status dan kedudukan objek/wajib pajak. Alat Ukur : - Rekomendasi penghapusan tunggakan	75 %

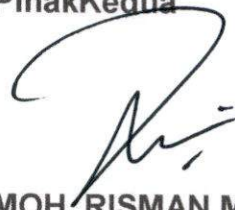
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Ekstensifikasi Sumber- sumber Pendapatan Daerah	188.584.700,00	

Pihak Pertama



AKHMAD ROKHZALI BONDE, SE

Pihak Kedua



MOH. RISMAN MASLOMAN, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NELMI ANGKARA, SE**

Jabatan : **KASUBID BELANJA NON KEGIATAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE**

Jabatan : **KABID PERBENDAHARAAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak Kedua,

SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

Pihak Pertama,

NELMI ANGKARA, SE

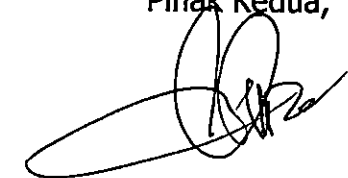
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan Perbendaharaan Kegiatan Non	Tercapainya pemahaman perbendaharaan oleh SKPD, sinkronisasi data perbendaharaan dengan institusi terkait, pengelolaan dan penatausahaan perbendaharaan non kegiatan yang tertib	34 SKPD

No.	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan, Penatausahaan Perbendaharaan Kegiatan Non	1.Tersedianya data Base gaji Alatukur : Jumlah ASN 2.Tersedianya data PFK Ala tukur : Surat setoran pajak 3.Tersalurnya hibah/ Bansoskepada Organisasi Alatukur : SP2D Tersalurnya ADD,DD,BHPD dan BHRD Alat ukur : SP2D	34 SKPD 34 SKPD 19 Penerima 15 Desa

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pembinaan, Koordinasi, Pengelolaan, PenatausahaanPerbendaharaan Non Kegiatan	84.154.425,00	

Pihak Kedua,



SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

Pihak Pertama,

NELMI ANGKARA, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **OLFI KASEUNAUNG, SE**

Jabatan : **KASUBID PERBENDAHARAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE**

Jabatan : **KABID PERBENDAHARAAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak Kedua,

SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

Pihak Pertama,

OLFI KASEUNAUNG, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pengelolaan kas daerah online dan aplikasi informasi pencairan SP2D	Terbitnya SP2D	15.500 Dokumen

No.	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pengelolaan kas daerah online dan aplikasi informasi pencairan SP2D	Meningkatkan Pemindahbukuan SP2D secara tepat dan efisien Alat Ukur : - SP2D - RC Bank	- 15.500 Dokumen - 15.000 Transaksi

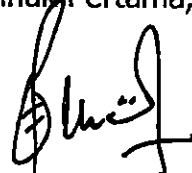
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pengelolaan kas daerah online dan aplikasi informasi pencairan SP2D	96.000.900	

Pihak Kedua,



SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

Pihak Pertama,



OLFI KASEUNAUNG, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ADI SUTRISNO MOKOAGOW, SE**

Jabatan : **KASUBID PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH DAN DESA**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE**

Jabatan : **KABID PERBENDAHARAAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak Kedua,

(SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE)

Pihak Pertama,

(ADI SUTRISNO MOKOAGOW, SE)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

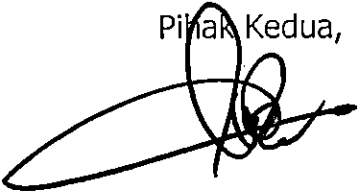
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah dan desa	Tercapainya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah dan desa	45 SKPD dan 15 Desa

No	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan dan desa	Terlaksananya Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah <u>Alat Ukur :</u> - Kegiatan Sosialisasi Resmi - Pembinaan Secara Langsung/Tatap Muka Tersedianya Draft Regulasi/Standar/Pedoman/ SK Pengelolaan Keuangan Daerah <u>Alat Ukur :</u> - Draft Regulasi/Standar/Pedoman/ SK Pengelolaan Keuangan Daerah Terpenuhinya Kelengkapan Dokumen Penatausahaan Keuangan <u>Alat Ukur :</u> - SPP / SPM - SP2D Tersedianya Laporan Penyaluran Dana Desa Melalui Aplikasi OM SPAN <u>Alat Ukur :</u> - Laporan Penyaluran	1 Kali 237 Hari Kerja 20 Dokumen 14.000 Dokumen 3 Dokumen

		Dana Desa Tersedianya Laporan Konsolidasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Melalui Aplikasi OM SPAN <u>Alat Ukur :</u> 1. Laporan Konsolidasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tersedianya Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) <u>Alat Ukur :</u> 1. Aplikasi SISKEUDES	3 Dokumen 1 Aplikasi
--	--	--	------------------------------------

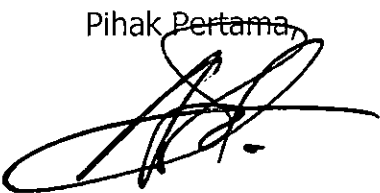
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Desa	88.422.200	

Pihak Kedua,



SYAFRUDIN SALEH ABAS, SE

Pihak Pertama,



ADI SUTRISNO MOKOAGOW, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RINDAH MOKOGINTA, SE,M.Ec.Dev**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG INVENTARISASI DAN DOKUMEN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **BAMBANG D. TOMBAAN, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ASET DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak pertama

RINDAH MOKOGINTA, SE,M.Ec.Dev

Pihak kedua

BAMBANG D. TOMBAAN, SE

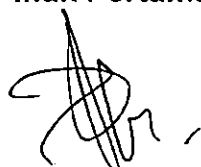
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang di Revaluasi	80% dari usulan SKPD
2.	Terlaksananya Sertifikasi Aset tetap Tanah	Jumlah Aset tetap Tanah yang di sertifikasi	30 Bidang

No.	SASARAN KEGIATAN	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
1	Penilaian Barang Milik Daerah	Buku Hasil Penilaian Alat Ukur : 1. SK Hasil Penilaian BMD	80% dari usulan SKPD
2	Pengamanan BMD berupa Aset Tetap Tanah	Sertipikat Hak Pakai Atas Nama Pemda Alat Ukur : Dokumen Sertipikat	30 Bidang

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	197.490.775	
2	Pengamanan Barang Milik Daerah	54.399.100	

Pihak Pertama



RINDAH MOKOGINTA, SE,M.Ec.Dev

Pihak Kedua



BAMEANG D. TOMBAAN, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **CHRISTOFEL KOBANDAHA, ST**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **BAMBANG D. TOMBAAN, SE**

Jabatan : **KEPALA BIDANG ASET DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak pertama

CHRISTOFEL KOBANDAHA, ST

Pihak kedua

BAMBANG D. TOMBAAN, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran BMD	Jumlah Penelaahan RKBMD dan RKPBM	42 OPD
2	Optimalisasi Pemanfaatan BMD	Jumlah BMD yang dimanfaatkan Pihak Lain	8 Unit
3	Rekonsiliasi BMD	Jumlah OPD yang melaksanakan Rekonsiliasi	118 UPB

No.	SASARAN KEGIATAN	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
1	Data Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang	Laporan RKBMD dan RKPBM alat ukur : Dokumen RKBMD dan RKPBM	42 OPD
2	Bentuk Pemanfaatan BMD	Dokumen Pemanfaatan Alat Ukur : 1. Dokumen Pinjam Pakai 2. Dokumen Sewa	6 Dokumen 2 Dokumen
3.	Neraca BMD	KIB dan Laporan BMD Alat Ukur: Dokumen	2 Dokumen

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	210.204.400	

Pihak Pertama



CHRISTOFEL KOBANDAHA, ST

Pihak Kedua



BAMBANG D. TOMBAAN, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ACHMAD AFFANDI BARA, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **BAMBANG D. TOMBAAN, SE**
Jabatan : **KEPALA BIDANG ASET DAERAH**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak pertama

ACHMAD AFFANDI BARA, SE

Pihak kedua

BAMBANG D. TOMBAAN, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Jumlah Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	80% dari usulan SKPD

No.	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
1	Terlaksananya Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD sesuai usulan	Data BMD yang dipindatangkan dan dihapuskan Alat Ukur : SK Penghapusan	80% dari usulan SKPD

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	161.566.000	

Pihak Pertama



ACHMAD AFFANDI BARA, SE

Pihak Kedua



BAMBANG D. TOMBAAN, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SARIF BINOL, SE**

Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN, PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak pertama

SARIF BINOL, SE

Pihak kedua

ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

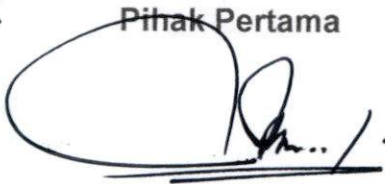
No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Mengoptimalkan pengelolaan data, perhitungan Nilai Jual Objek Pajak dan Penetapan Pajak Daerah	Terciptanya basis data PBB-P2, Restoran/rumah Makan, Hotel, RumahKost, Hiburan dan Pajak Reklame Papan Nama (PRPN) Memberikan pelayanan maksimal terhadap Wajib Pajak Memaksimalkan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak dalam penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak daerah Terhutang (SPPDT) PBB-P2 dan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)	100 % 100 % 100 %

No.	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Mengoptimalkan pengelolaan data, perhitungan Nilai Jual Objek Pajak dan Penetapan Pajak Daerah	Pendataan Objek Pajak dan Wajib Pajak PBB-P2, Restoran / Rumah Makan, Hotel, Kost Hiburan dan Pajak Reklame Papan Nama (PRPN) Alat ukur : 1. Data Wajib Pajak 2. Jumlah Wajib Pajak	Potensi PBB Kotamobagu Barat 2018 : 7600 OP 2019 : 9500 OP Target pajak hotel 2019 : Rp.850.000.000. 2020 : Rp.1.700.000.000.
2.		Menerima dan melayani konsultasi wajib pajak wajib pajak Alat ukur : 1. Data Wajib Pajak 2. Formulir pendaftaran data wajib pajak	Target pajak Rumah makan /-Restoran 2019 : Rp.3.000.000.000. 2020 : Rp.2.500.000.000. Target pajak Hiburan 2019 : Rp.220.000.000. 2020 : Rp.350.000.000.
3.		Melakukan perhitungan dan penetapan nilai pajak Alat ukur : 1. Data Wajib Pajak 2. Formulir pendaftaran data wajib pajak 3. Jumlah potensi pajak	Target pajak Reklame 2019 : Rp.1.000.000.000. 2020 : Rp.900.000.000. Data objek dan wajib pajak Kota Kotamobagu PBB-P2 2019 : 29.448 OP 2020 : 31.750 OP HOTEL 2019 : 13 OP 2020 : 13 OP

			RUMAH KOST 2019 : 25 OP 2020 : 25 OP RUMAH MAKAN / RESTORAN 2019 : 69 OP 2020 : 69 OP HIBURAN 2019 : 14 OP 2020 : 14 OP REKLAME 2019 : 1291 OP 2020 : 1291 OP
--	--	--	---

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Kajian Perda/Perwa/SK/SOP dan Sosialisasi Perda/Perwa/SOP Pajak dan Retrinusi Daerah.	165.134.350	

Pihak Pertama



SARIF BINOL, SE

Pihak Kedua



ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **IRMA DAENG ALI, SE**
Jabatan : **KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN DAN PENGOLAHAN DATA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak pertama

IRMA DAENG ALI, SE

Pihak kedua

ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	- Terlaksananya Pembayaran Jasa Bank	Terpenuhinya Permintaan Jasa Transaksi Perbankan	90 %
	- Meningkatkan Kerjasama Pemkot dan Perbankan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama	95 %
2	- Memaksimalkan Potensi dan Target Penerimaan PAD	Tercapaiannya Target Penerimaan PAD	100 %

No.	SASARAN STRATEGIS	HASIL KINERJA	TARGET KINERJA
1	- Terlaksananya Pembayaran Jasa Bank	Percepatan Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah	Data Transaksi
	- Meningkatkan Kerjasama Pemkot dan Perbankan	Alat Ukur : 1. Jumlah Transaksi 2. RC Bank	Fasilitasi : - Mesin Perporasi - E-Tax - Pajak :
2.	- Memaksimalkan Potensi dan Target Penerimaan PAD	Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Alat Ukur : 1. Peralatan Legalitas 2. Jenis Pajak	1. Hotel 2. Restoran 3. Hiburan 4. Reklame 5. BPHTB 6. PBB-P2 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

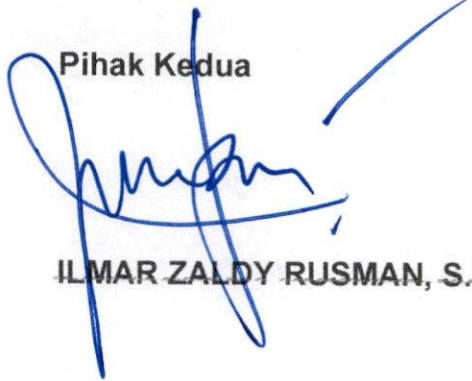
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1.	Jasa Transaksi Keuangan	210.000.000	
2.	Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	190.290.000	

Pihak Pertama



IRMA DAENG ALI, SE

Pihak Kedua



ILMAR ZALDY RUSMAN, S.STP



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **M. GUNTUR NIU, SE**

Jabatan : **KASUBBAG PERENCANAAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Dra. SCHERLY ABDULLAH**

Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu, 2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dra. SCHERLY ABDULLAH

M. GUNTUR NIU, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>Tersedianya dokumen pelaporan</i>	<i>Jumlah Dokumen Pelaporan</i>	<i>5 Dokumen</i>
2.	<i>Tersedianya Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	<i>Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasioanal yang dipelihara rutin/berkala</i>	<i>1 Paket</i>
3	<i>Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<i>Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia</i>	<i>1 Paket</i>

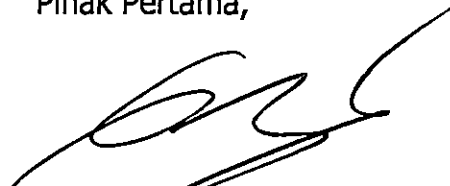
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	42.000.000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.000.000	

Pihak Kedua,



Dra. SCHERLY ABDULLAH

Pihak Pertama,



M. GUNTUR NIU, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **TELI TONGKASI, SE**

Jabatan : **KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Dra.SCHERLY ABDULLAH**

Jabatan : **SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dra.SCHERLY ABDULLAH

TELI TONGKASI, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Jumlah Dokumen bermaterai</i>	<i>200 Lbr</i>
2.	<i>Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>Jumlah dan jenis alat tulis kantor</i>	<i>35 jenis</i>
3.	<i>Terselenggaranya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan</i>	<i>5.140 Lbr</i>
4.	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>	<i>Jumlah ruang kantor yang dibersihkan</i>	<i>9 Bulan</i>
5.	<i>Penyediaan Kebutuhan Administrasi umum</i>	<i>Jumlah THL</i>	<i>23 Orang</i>

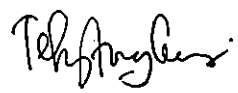
NO.	KEGIATAN	ANGGARAN	KET
	Penyediaan jasa surat menyurat	1.200.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	54.000.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	8.806.900	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.938.000	
	Penyediaan kebutuhan administrasi umum	375.000.000	

Pihak Kedua,



Dra.SCHERLY ABDULLAH

Pihak Pertama,



TELI TONGKASI, SE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ZUBAIDAH DJAMA, SP**

Jabatan : **KASUB BAG KEUANGAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **Dra. SCHERLY ABDULLAH**

Jabatan : **SEKRETARIS BPKD**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kotamobagu,

2020

Pihak Kedua,

Dra. SCHERLY ABDULLAH

Pihak Pertama,

ZUBAIDAH DJAMA, SP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>Terbitnya dokumen RKA dan DPA SKPD sesuai KUA PPAS</i>	<i>Tersedianya dokumen RKA dan DPA SKPD</i>	<i>2 Dokumen</i>
2.	<i>Terbitnya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD tepat waktu</i>	<i>Tersedianya Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan bulanan</i>	<i>12 bulan</i>
3.	<i>Terbitnya Laporan Keuangan SKPD yang akuntabel</i>	<i>Terlaksananya kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan.</i>	<i>2 Dokumen</i>

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	KET
	<i>Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor</i>	4.988.600	4 Jenis
	<i>Penyediaan makanan dan minuman</i>	10.080.000	340 Dos
	<i>Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	182.700.000	35 kali

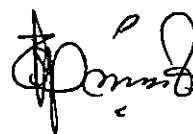
Kotamobagu, Januari 2020

Pihak kedua,



Dra. SCHERLY ABDULLAH

Pihak Pertama,



ZUBAIDAH DJAMA, SP